

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode Tahun 2016 – 2020)**

SKRIPSI



Oleh

MAR'ATUL 'AINISH SHOLIKHAH

NIM : 18520055

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode Tahun 2016 – 2020)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

MAR'ATUL 'AINISH SHOLIKHAH

NIM : 18520055

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode Tahun 2016 – 2020)

SKRIPSI

Oleh

MAR'ATUL 'AINISH SHOLIKHAH
NIM : 18620055

Telah disetujui *21 Juni* 2022

Dosen Pembimbing,



Fajar Nurdin, SE., M. Ak., CA
NIP. 198310052019031006

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah, S.Pd., SE., M. Bus. Ak., CA., M.Res., Ph.D /
NIP. 197606172008012020

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016 – 2020)

SKRIPSI

Oleh
MAR'ATUL 'AINISH SHOLIKHAH
NIM : 18520055

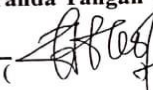
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 27 Juni 2022

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Fatmawati Zahroh, M.S.A
NIP 198602282019032010

: ()

2. Pembimbing/ Sekretaris

Fajar Nurdin, SE., M. Ak., CA
NIP 198310052019031006

: ()

3. Penguji Utama

Sri Andriani, M. Si
NIP 197503132009122001

: ()



Mengetahui :
Kema Jurusan,

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D
NIP. 19760617200801 2 020

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atul 'Ainiah Sholikhah
NIM : 18520055
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016 – 2020) adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Juni 2022

Hormat saya,



Mar'atul 'Ainiah Sholikhah

NIM : 18520055

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Listiyowati Wahyu Andayani dan Bapak M. Kowim yang telah berjasa dalam hidup saya. Telah memberikan saya dukungan secara material, spiritual, semangat serta motivasi dalam perjalanan menuntut ilmu ini.
2. Saudara – saudara saya serta keluarga besar Tuwuh Tamami yang membantu mendukung secara moril dan spiritual dalam proses menyelesaikan studi saya.
3. Dosen – dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terutama dosen – dosen pada prodi akuntansi, terimakasih banyak telah memberikan ilmu, inspirasi dan motivasi kepada saya.
4. Teman – teman dan para sahabat yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan moril hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

“Impian itu punya semua orang, dari semua kalangan, kelas, dan tingkatan. Percaya dan yakinlah dengan impianmu maka impianmu akan percaya dan yakin denganmu”

Wirda Mansur

“Buatlah gebrakan demi gebrakan. Perubahan demi perubahan. Sedikit perubahan lebih baik daripada nggak berubah sama sekali”

Wirda Mansur

“Be yourself – not your idea of what you think somebody else’s idea of yourself should be:

Henry David T

“Don’t be afraid to give, because even if the subject of your love gives less in return, the world will give back so much more”

Maudy Ayunda

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016 – 2020)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE, M.Bus., Ak. CA, M.Res, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Fajar Nurdin, M.Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian pada laporan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan
6. Ibu (Listiyowati Wahyu Andayani), Ayah (M. Kowim), Adik dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril maupun spritual

7. Para sahabat yang senantiasa menyemangati penulis selama proses penyelesaian skripsi (Dewi, Teti, Nadya, Tawakal, Jannah, Ririn, Arin)
8. Teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Dan untuk diri saya sendiri terimakasih telah bertahan dan mampu hingga titik ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin.

Malang, 27 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Pajak.....	19
2.2.2 Good Corporate Governance.....	20
2.2.3 Dewan Komisaris Independen	21
2.2.4 Kepemilikan Institusional	21
2.2.5 Kepemilikan Manajerial.....	22
2.2.6 Komite Audit.....	22
2.2.7 Tax Avoidance	23
2.2.8 Landasan Hukum Islam.....	23
2.3 Kerangka Konseptual	25

2.4	Hipotesis	25
2.4.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	25
2.4.2	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	26
2.4.3	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i>	26
2.4.4	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	26
2.4.5	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
3.2	Lokasi Penelitian	28
3.3	Populasi dan Sampel	28
3.3.1	Populasi	28
3.3.2	Sampel	33
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	34
3.5	Data dan Jenis Data	36
3.6	Teknik Pengumpulan Data	36
3.7	Definisi Operasional Variabel	36
3.7.1	Tax Avoidance	36
3.7.2	Dewan Komisaris Independen	36
3.7.3	Kepemilikan Institusional	37
3.7.4	Kepemilikan Manajerial	37
3.7.5	Komite Audit	37
3.8	Analisis Data	38
3.8.1	Uji Asumsi Klasik	38
3.8.1.1	Uji Normalitas	38
3.8.2.2	Uji Multikolinieritas	39
3.8.3.3	Uji Heteroskedastisitas	39
3.8.3.4	Uji Autokorelasi	39
3.8.2	Analisis Regresi Linear Berganda	40
3.8.2.1	Koefisien Determinasi (R^2)	40

3.8.2.2	Uji t (Uji Parsial)	41
3.8.3.3	Uji F (Uji Simultan)	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1	Hasil Penelitian.....	42
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.1.2	Persiapan Analisis Data.....	44
4.1.2.1	Dewan Komisaris Independen	44
4.1.2.2	Kepemilikan Institusional	46
4.1.2.3	Kepemilikan Manajerial.....	47
4.1.2.4	Komite Audit	49
4.1.2.5	Tax Avoidance	50
4.2	Analisis Data	52
4.2.1	Asumsi Klasik	52
4.2.2.1	Uji Normalitas	52
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas	53
4.2.2.3	Uji Autokorelasi	54
4.2.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.3	Hasil Pengujian Hipotesis	56
4.3.1	Uji Regresi Linear Berganda.....	56
4.3.2	Koefisien Determinasi (R^2).....	57
4.3.3	Uji Parsial (Uji t).....	58
4.3.4	Uji Simultan (Uji f)	60
4.4	Pembahasan Hasil penelitian.....	61
4.4.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	61
4.4.2	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	62
4.4.3	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	63
4.4.4	Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	64
4.4.4	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	65
BAB V	PENUTUP.....	66

5. 1 Kesimpulan 66

5. 2 Saran 67

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Negara (Triliun Rupiah).....	3
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. 2	Perbedaan Penelitian.....	15
Tabel 3. 1	Daftar Populasi Perusahaan Jasa Periode 2016 – 2020.....	28
Tabel 3. 2	Teknik Pengambilan Sampel	34
Tabel 3. 3	Daftar Perusahaan Sampel Penelitian Periode 2016 – 2020	35
Tabel 3. 4	Tabel Operasional Variabel	38
Tabel 4. 1	Teknik Pngambilan Sampel	42
Tabel 4. 2	Daftar Perusahaan Sampel Penelitian Periode 2016 – 2020	43
Tabel 4. 3	Hasil Perhitungan Data Dewan Komisaris Independen	45
Tabel 4. 4	Hasil Perhitungan Data Kepemilikan Institusional	46
Tabel 4. 5	Hasil Perhitungan Data Kepemilikan Manajerial	48
Tabel 4. 6	Hasil Perhitungan Data Komite Audit	49
Tabel 4. 7	Hasil Perhitungan Data <i>Tax Avoidance</i>	50
Tabel 4. 8	Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4. 9	Hasil Uji Multikolonieritas	53
Tabel 4.10	Hasil Uji Autokorelasi	54
Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	56
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.13	Hasil Uji Parsial	58
Tabel 4.14	Hasil Uji Simultan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	25
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Hasil Perhitungan Cash Effective Rates
- Lampiran 1 (Lanjutan): Hasil Perhitungan Cash Effective Rate
- Lampiran 2: Hasil Perhitungan Dewan Komisaris Independen
- Lampiran 2 (Lanjutan): Hasil Perhitungan Dewan Komisaris Independen
- Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional
- Lampiran 3 (Lanjutan) : Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional
- Lampiran 4 : Hasil Perhitungan Kepemilikan Manajerial
- Lampiran 4 (Lanjutan) : Hasil Perhitungan Kepemilikan Manajerial
- Lampiran 5 : Hasil Perhitungan Komite Audit
- Lampiran 5 (Lanjutan) : Hasil Perhitungan Komite Audit
- Lampiran 6 : Data Variabel yang Menjadi Sampel
- Lampiran 7 : Hasil Pengujian Data

ABSTRAK

Mar'atul 'Ainish Sholikhah. 2022, Skripsi. Title: "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016 – 2020)"

Pembimbing: Fajar Nurdin, S. E., M. Ak., CA

Kata Kunci: *Dewan Komisaris independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit*

Pajak merupakan pungutan negara yang bersifat wajib, ditujukan untuk orang pribadi serta badan dan tidak ada timbal balik secara langsung serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu hal penting bagi pemerintah karena sebagai sumber pemasukan terbesar bagi negara. Perusahaan di dalam meminimalkan beban pajak, mereka melakukan perencanaan pajak. Salah satu upaya dalam perencanaan pajak yakni melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Tax avoidance merupakan aktivitas meminimalkan beban pajak dengan melakukan penghematan pajak secara legal sesuai ketentuan perpajakan. Adanya tax avoidance sendiri memberikan dampak yang signifikan bagi negara. Pemasukan negara yang berasal dari pajakpun berkurang. Pada tahun 1998 mulai dikenal fenomena corporate governance ini disaat Indonesia mengalami krisis berkepanjangan. Tujuan dari corporate governance adalah mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik salah satunya dalam ranah perpajakan. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap tax avoidance dari perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai uji hipotesis . Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2020. Terdapat 28 sampel perusahaan jasa yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian tahun 2016 – 2020 yang dipilih menggunakan metode purposive sampling yang digunakan di dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance dengan nilai koefisien determinasi sebesar 40,1%. Sehingga dapat dikatakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki peran penting di dalam melakukan perencanaan pajak yaitu tax avoidance.

ABSTRAK

Mar'atul 'Ainish Sholikhah. 2022, Thesis. Title: "*The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study on Trade, Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2016 – 2020*"

Advisor: Fajar Nurdin, S. E., M. Ak., CA

Keywords: *Independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, audit committees, tax avoidance*

Taxes are mandatory state levies, intended for private persons and entities and there is no direct reciprocity and is used for the prosperity of the people. Taxes are one of the important things for the government because they are the largest source of income for the country. Companies in minimizing the tax burden, they do tax planning. One of the efforts in tax planning is to carry out tax avoidance. Tax avoidance is an activity to minimize tax burdens by making tax savings legally in accordance with tax provisions. The existence of tax avoidance itself has a significant impact on the country. State income derived from taxes was reduced. In 1998, this phenomenon of corporate governance began to be known when Indonesia experienced a prolonged crisis. The purpose of corporate governance is to realize good corporate governance, one of which is in the realm of taxation. This study is to determine the influence of independent boards of commissioners, institutional ownership, managerial ownership and audit committees on the tax avoidance of service companies listed on the BEI in 2016-2020.

This study is of a quantitative type using multiple linear regression analysis as a hypothesis test. This study used secondary data on the financial statements of service companies listed on the BEI for the 2016-2020 period. There were 28 samples of service companies listed on the BEI with a research period of 2016-2020 selected using the purposive sampling method used in this study.

The results showed that the independent board of commissioners, institutional ownership, managerial ownership and audit committee had a significant positive effect on tax avoidance with a coefficient of determination value of 40.1%. So it can be said that the board of commissioners is independent, institutional ownership, managerial ownership and audit committee have an important role in carrying out tax planning, namely tax avoidance.

المستخلص

مرأة العين الصالحة. 2022، أطروحة. العنوان: "تأثير الحوكمة الرشيدة للشركات على التهرب الضريبي (دراسة تجريبية على شركات

الخدمات المدرجة في بورصة إندونيسيا للفترة 2016-2020"

المشرف: فجر نور الدين، س. إ. م. أك.، كاليفورنيا

الكلمات المفتاحية: مجلس مفوضين مستقل، ملكية مؤسسية، ملكية إدارية، لجنة تدقيق

الضرائب هي رسوم حكومية إلزامية ، مخصصة للأشخاص والكيانات الخاصة ولا توجد معاملة بالمثل مباشرة وتستخدم لازدهار الشعب. الضرائب هي واحدة من الأشياء المهمة للحكومة لأنها أكبر مصدر للدخل للبلاد. الشركات في تقليل العبء الضريبي ، فإنها تقوم بالتخطيط الضريبي. أحد الجهود المبذولة في التخطيط الضريبي هو تنفيذ التهرب الضريبي. التهرب الضريبي هو نشاط لتقليل الأعباء الضريبية من خلال تحقيق وفورات ضريبية بشكل قانوني وفقا للأحكام الضريبية. وجود التهرب الضريبي نفسه له تأثير كبير على البلاد. وانخفاض دخل الدولة المستمد من الضرائب. في عام 1998 ، بدأت ظاهرة حوكمة الشركات هذه معروفة عندما شهدت إندونيسيا أزمة طويلة. والغرض من إدارة الشركات هو تحقيق الإدارة الرشيدة للشركات، التي يقع أحدها في مجال الضرائب. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير مجالس المفوضين المستقلة والملكية المؤسسية والملكية الإدارية ولجان التدقيق على التهرب الضريبي لشركات الخدمات المسجلة في باي في الفترة 2016-2020.

هذه الدراسة من النوع الكمي باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد كاختبار فرضية. استخدمت هذه الدراسة بيانات ثانوية عن القوائم المالية لشركات الخدمات المدرجة في الباي للفترة 2016-2020. تم اختيار 28 عينة من شركات الخدمات المسجلة في باي مع فترة بحث 2016-2020 باستخدام طريقة أخذ العينات الهادفة المستخدمة في هذه الدراسة.

وأظهرت النتائج أن مجلس المفوضين المستقلين والملكية المؤسسية والملكية الإدارية ولجنة التدقيق كان لها أثر إيجابي كبير على التهرب الضريبي بقيمة معامل تحديد بلغت 40.1%. لذلك يمكن القول أن مجلس المفوضين مستقل ، والملكية المؤسسية والملكية الإدارية ولجنة التدقيق لها دور مهم في تنفيذ التخطيط الضريبي ، وهو التهرب الضريبي

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang - Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021, pajak merupakan pungutan negara yang bersifat wajib, ditujukan untuk orang pribadi serta badan dan tidak ada timbal balik secara langsung serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu hal penting bagi pemerintah karena sebagai sumber pemasukan terbesar bagi negara. Perusahaan akan berusaha sekecil mungkin untuk membayar pajak dikarenakan itu adalah beban bagi perusahaan.

Perusahaan di dalam meminimalkan beban pajak, mereka melakukan perencanaan pajak. Salah satu upaya dalam perencanaan pajak yakni melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* sendiri sebenarnya cukup unik karena di satu sisi perusahaan boleh melakukan *tax avoidance*, tetapi di sisi lain dapat mengurangi pemasukan negara. *Tax avoidance* merupakan aktivitas meminimalkan beban pajak dengan melakukan penghematan pajak secara legal sesuai ketentuan perpajakan (Sari, 2014). Perencanaan pajak yang melanggar ketentuan perpajakan merupakan aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Tentu saja agar tidak bertentangan dengan hukum, rata – rata perusahaan lebih memilih melakukan penghindaran pajak daripada penggelapan pajak Sebagai upaya dalam melakukan perencanaan pajak agar tidak terjatuh kedalam ambiguitas, otoritas pajak telah menciptakan batas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak (Annisa & Kurniasih, 2012)

Pada tahun 2016 terungkap kasus penghindaran pajak oleh perusahaan di bidang jasa kesehatan yang terafiliasi perusahaan di Singapura, PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI). Modal yang diperoleh perusahaan berasal dari pinjaman oleh pemilik perusahaan yang ada di Sngapura kepada PT. RNI. Pemilik

perusahaan yang berada di Singapura menganggap bunga yang telah dibayar sebagai deviden. Perusahaan itu bisa menghindar dari kewajiban membayar pajak karena modal yang ada diakui sebagai utang sehingga bisa mengurangi pajak. Pada periode tahun 2007 – 2015 dua pemegang saham PT. RNI yang berkewarganegaraan Indonesia tidak mepokan SPTnya dengan benar, serta dua pemegang saham asal Singapura yang memiliki usaha di Indonesia tidak membayar pajak penghasilannya (money.kompas.com, 2016).

Fenomena penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT. Adaro Energy. Perusahaan ini memanfaatkan anak perusahaan yang berada di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk membayar US\$ 125 juta lebih sedikit ke pemerintah Indonesia dari yang seharusnya disetorkan dari tahun 2009 – 2017. Dengan cara memindahkan lebih banyak uang melalui tempat bebas pajak, kemungkinan besar juga PT. Adaro Energy telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia. Kondisi ini berbanding terbalik dengan apa yang dicitrakan perusahaan selama ini sebagai pemberi kontribusi terhadap pemerintah (m.bisnis.com, 2019).

Fenomena penghindaran pajak selanjutnya yakni Pandora Paper. Pandora Paper merupakan sekumpulan dokumen yang mengungkap rahasia keuangan seperti kekayaan tersembunyi dan penghindaran pajak para tokoh dunia. Dua tokoh dari Indonesia disinyalir masuk ke dalam daftar nama Pandora Paper. Dua tokoh tersebut yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto. Skandal penghindaran pajak oleh pejabat negara ini merupakan aib bagi Indonesia disaat pemerintahan sedang mengkampanyekan disiplin pajak (keuangannews.id, 2021).

Adanya *tax avoidance* sendiri memberikan dampak yang signifikan bagi negara. Pemasukan negara yang berasal dari pajakpun berkurang. Penerimaan pajak sampai akhir Oktober 2021 mencapai Rp 953,6 triliun, artinya telah memenuhi 77,56 persen dari target APBN 2021. Sementara untuk realisasi penerimaan pajak 2021 tumbuh sebesar 15,3 persen. Hal ini diungkap oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN 2021. Berikut tabel realisasi penerimaan pajak negara selama 5 tahun terakhir (kemenkeu.go.id, 2021).

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Negara (Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Negara	Realisasi Penerimaan Pajak Negara	Presentase Penerimaan
2016	Rp 1.539	Rp 1.283	83%
2017	Rp 1.283	Rp 1.147	89%
2018	Rp 1.424	Rp 1.315,9	92%
2019	Rp 1.577,6	Rp 1.332,1	84%
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.069,98	89%

Sumber: CNBC Indonesia

Tujuan dari *corporate governance* adalah mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik salah satunya dalam ranah perpajakan. Pada tahun 1998 mulai dikenal fenomena *corporate governance* ini disaat Indonesia mengalami krisis berkepanjangan. Lemahnya pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia menjadikan proses pemulihan Indonesia dari krisis lumayan lama sehingga pemerintah serta para investor mulai memberikan perhatian khusus terhadap praktek *corporate governance* (Kusmayadi et al., 2015). Mekanisme corporate governance meliputi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit (Y. L. Ginting, 2016).

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan manajemen dan kinerja direksi, dibutuhkan dewan komisaris independen (Sari, 2014). Kepemilikan institusional mempengaruhi besarnya tekanan yang didapatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak sehingga bisa memaksimalkan laba perusahaan (Zahirah, 2017). Pada penelitian yang sama, dikemukakan bahwa proporsi kepemilikan saham manajerial yang dimiliki jauh lebih kecil daripada

kepemilikan institusional. Maka dalam penentuan kebijakan perusahaan pihak manajerial belum memiliki hak.

Pada penelitian terdahulu terdapat indikator yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, presentase dewan komisaris independen dan komite audit. Dari keempat indikator tersebut, masih memiliki hasil yang berbeda pada setiap penelitian. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan manajemen perusahaan dan menjamin terlaksananya strategi perusahaan serta merupakan inti dari *corporate governance* itu sendiri. Kepemilikan saham oleh institusi lain disebut kepemilikan institusional. Tingginya tingkat pengawasan kinerja manajemen dipengaruhi oleh adanya kepemilikan institusional. Sementara itu kepemilikan saham oleh pihak manajemen disebut sebagai kepemilikan manajerial, disini pihak manajemen berhak juga ikut di dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Dewan komisaris independen berfungsi untuk melakukan pengawasan serta pengendalian perusahaan, sehingga mempengaruhi dalam hal penghindaran pajak (Winata, 2014). Dewan komisaris independen mempengaruhi aktivitas monitoring perusahaan sehingga mengurangi kegiatan penghindaran pajak (Wijayanti, 2016). Berbeda dengan hasil penelitian mereka, penelitian milik Prasetyo & Pramuka (2018) menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena posisi dewan komisaris independen sebagai bagian dari luar manajemen perusahaan mewajibkan perusahaan untuk lebih mengungkapkan informasi keuangannya kepada para pemegang saham, sehingga manajemen perusahaan tidak bisa mempengaruhi komisaris independen.

Menurut Putri & Lawita (2019) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kecilnya praktik penghindaran pajak diakibatkan oleh besarnya tingkat pengawasan dari institusi yang menimbulkan beban pajak yang dibayarkan semakin tinggi. Praktik penghindaran pajak oleh manajemen didorong oleh besarnya saham yang dimiliki oleh institusi sebagai upaya untuk meningkatkan laba perusahaan (Zahirah, 2017). Perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan dan jaminan dalam berinvestasi, maka

harus meminimalisir beban pajak lewat perencanaan pajak (Prasetyo & Pramuka, 2018). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian milik Ginting (2016), Cahyono et al. (2016), dan Mahulae et al., n.d. (2016)

Besarnya kepemilikan saham oleh manajer, menyebabkan kecilnya peluang manajer untuk melakukan praktik kecurangan sehingga kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Putri & Lawita, 2019). Kepemilikan manajerial akan membuat pihak manajemen untuk lebih memperhatikan kelangsungan perusahaannya (Putri & Lawita, 2019). Kepemilikan saham oleh pihak manajemen mempengaruhi pihak manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Pihak manajemen berkewajiban dalam kegiatan operasional perusahaan dan juga memiliki peran dalam menghasilkan laba perusahaan (Ashari et al., 2020). Hasil penelitian mereka berbeda dengan penelitian Prasetyo & Pramuka (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, karena pihak manajerial kurang memiliki hak dan wewenang dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Dikarenakan minimnya penelitian tentang penghindaran pajak yang menggunakan perusahaan jasa sebagai objek untuk diteliti dan sekaligus sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, maka perusahaan jasa digunakan di dalam objek penelitian ini. Perusahaan jasa merupakan industri yang mendominasi laju pertumbuhan lapangan usaha di Indonesia, serta merupakan industri berbasis pengetahuan yang tinggi. Penghindaran pajak dihitung menggunakan rumus cash effective tax rate (CASH ETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Multi & Limarjani, 2020).

Berdasarkan hasil dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016 – 2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah presentase dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisi audit secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menentukan secara parsial dampak kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menentukan secara parsial dampak kepemilikan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menentukan secara parsial dampak kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menentukan secara parsial dampak komite audit terhadap penghindaran pajak
5. Untuk menentukan secara simultan dampak dewan komisaris independen, kepemilikan istitusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Bermanfaat untuk mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa
2. Bagi mahasiswa
Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut atas *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*
3. Bagi Perusahaan
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan tentang pentingnya pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat mencegah masuk ke dalam kegiatan ilegal dalam perencanaan pajak.

1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian ini untuk menghindari pembicaraan diluar permasalahan sehingga hanya terfokus pada permasalahan penelitian. Batasan penelitian ini yaitu hanya menggunakan sampel perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Marfirah & Bz, 2016)	Pengaruh corporate governance dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) tahun 2011-2015	Kuantitatif, Analisis regresi berganda	Tax avoidance dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, kualitas audit, dewan komisaris, leverage dan komite audit.
2	(Annisa & Kurniasih, 2012)	Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance	Kuantitatif	Tax avoidance tidak dipengaruhi kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris independen, tetapi dipengaruhi oleh komite audit dan kualitas audit.

3	(Putri & Lawita, 2019)	Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak	Kuantitatif	Penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial
4	(Zahirah, 2017)	Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej periode 2013-2015)	Kuantitatif	Penghindaran pajak dipengaruhi oleh leverage dan kepemilikan institusional, tetapi tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan.
5	(Cahyono et al., 2016)	Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), leverage (der) dan profitabilitas (roa) terhadap	Kuantitatif	Tax avoidance dipengaruhi oleh komite audit dan kepemilikan institusional, akan tetapi tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, leverage dan ROA.

		tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing bei periode tahun 2011 – 2013		
6	(Prasetyo & Pramuka, 2018)	Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance	Kuantitatif	Tax avoidance dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen.
7	(Saputra et al., 2015)	Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di bei	Kuantitatif	Tax avoidance tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen, kualitas audit serta komite audit, akan tetapi dipengaruhi oleh ROA dan karakter eksekutif
8	(Sari, 2014)	Pengaruh corporate governance, ukuran	Kuantitatif	Tax avoidance dipengaruhi oleh komisaris independen dan ukuran perusahaan, akan

		perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI)		tetapi tidak dipengaruhi oleh komite audit, kompensasi rugi fiskla dan kepemilikan institusional.
9	(T. B. Santoso & Muid, 2014)	Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan	Kuantitatif	Tax avoidance tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen, kepemilikan saham oleh publik dan ukuran perusahaan, tetapi dipengaruhi oleh kompensasi eksekutif, kinerja perusahaan dan tingkat hutang perusahaan.
10	(Krisna, 2019)	Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada tax avoidance dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi	Kuantitatif	Tax avoidance dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, tetapi tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.

11	(Rohyana & Maryana, 2021)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada 7 Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI 2015-2019	Kuantitatif	Penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit
12	(Sunarsih & Handayani, 2016)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Kuantitatif	Penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, kualitas audit , tetapi tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif dan komite audit.
13	(Wijayanti 2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur	Kuantitatif	Penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, komisaris independen dan kepemilikan institusional, tetapi tidak dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga.

		yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)		
14	(Ashari et al., 2020)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Kuantitatif	Tax avoidance dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, tetapi tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional.
15	(Nugraheni & Pratomo , 2018)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)	Kuantitatif	Tax avoidance dipengaruhi oleh komite audit, tetapi tidak dipengaruhi oleh kualitas audit dan ukuran perusahaan.
16	(Dewi, 2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris	Kuantitatif	Tax avoidance dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen, tetapi tidak

		Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016		dipengaruhi oleh komite audit.
17	(Triyanti et al 2020)	Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Kuantitatif	Tax avoidance dipengaruhi oleh variabel size, leverage dan umur perusahaan, tetapi tidak dipengaruhi oleh profitabilitas, komite audit dan komisaris independen.
18	(Pujilestari, R., & Winedar, M, 2019)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance	Kuantitatif	Tax avoidance dipengaruhi oleh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kualitas audit dan komite audit.

Berikut ini disajikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

Tabel 2. 2
Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti (Tahun)	Perbedaan Penelitian
1	(Marfirah & Bz, 2016)	Pada penelitian ini menggunakan corporate governance dan leverage sebagai variabel independen penelitian serta sampel yang digunakan yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 – 2015. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini menggunakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen serta sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.
2	(Annisa & Kurniasih, 2012)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini yakni seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan hanya perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.
3	(Putri & Lawita, 2019)	Pada penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen penelitian. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini menggunakan dewan komisaris independen,

		kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen.
4	(Zahirah, 2017)	Pada penelitian ini menggunakan leverage, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen penelitian. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini menggunakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen.
5	(Cahyono et al., 2016)	Pada penelitian ini menggunakan komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), leverage (der) dan profitabilitas (roa) sebagai variabel independen penelitian dan sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang listing bej pada tahun 2011 – 2013. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini menggunakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen serta sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.
6	(Prasetyo & Pramuka, 2018)	Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) yang listing di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.

7	(Saputra et al., 2015)	Pada penelitian ini menggunakan corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif sebagai variabel independen penelitian. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini menggunakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen.
8	(Sari, 2014)	Pada penelitian ini menggunakan corporate governance, ukuran perusahaan, kompensasi Rugi fiskal dan struktur kepemilikan sebagai variabel independen penelitian. .Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini menggunakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen.
9	(Santoso & Muid, 2014)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.
10	(Krisna, 2019)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.

11	(Rohyana & Maryana, 2021)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sektor <i>food and bavearages</i> periode 2015 - 2019. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yag terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.
12	(Sunarsih & Handayani, 2016)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yag terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.
13	(Wijayanti,2016)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yag terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.
14	(Ashari et al., 2020)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yag terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.
15	(Nugraheni & Pratomo, 2018)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah

		perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020
16	(Dewi, 2019)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020
17	Triyanti et al (2020)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.
18	(Pujilestari, R., & Winedar, M, 2019)	Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Sementara itu pada penelitian yang saya lakukan saat ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pajak

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang - Undang Re publik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak merupakan pungutan negara yang bersifat wajib, ditujukan untuk orang pribadi serta badan dan tidak ada timbal

balik secara langsung serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak memberikan manfaat bagi negara sebagai penunjang kegiatan perekonomian, penggerak roda pemerintahan dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah melalui fasilitas umum yang diterima masyarakat (Moeljono, 2020).

Pajak merupakan iuran wajib warga negara yang tidak mendapat balasan secara langsung. Pajak sangat berguna untuk membantu pembangunan negeri ini. Oleh karena itu setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria wajib pajak diharapkan mau berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Hasil dari pemungutan pajak ini oleh negara juga dapat digunakan untuk membayar hutang negara.

2.2.2 Good Corporate Governance

Cadbury commite dalam Kusmayadi et al., (2015) *corporate governance* merupakan sekumpulan aturan yang berhubungan dengan para pemangku kepentingan eksternal maupun internal perusahaan dan para pemegang saham dengan memiliki hak dan kewajibannya sendiri, yaitu suatu sistem mengarahkan dan mengawasi perusahaan. *Good corporate governance* adalah ketentuan mengenai hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, direksi, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya serta untuk meningkatkan integritas perusahaan. Adanya corporate governance di dalam perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang menggambarkan hubungan antar pelaku di dalam perusahaan sangat menentukan arah kinerja perusahaan. Karena tata kelola perusahaan tergantung pada sitem perencanaan pajak (Winata, 2014).

Menurut OECD dalam Kusmayadi et al., 2015 ada lima prinsip dasar tata kelola perusahaan. Pertama fairness, yaitu perlakuan secara adil dan setara saat menjalankan hak kepentingan sesuai dengan kontrak dan hukum serta peraturan yang berlaku. Kedua transparansi, yaitu keterbukaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan terhadap pengungkapan data dan informasi terkait tentang perusahaan. Ketiga akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan tanggung jawab badan korporat untuk pengelolaan perusahaan yang efektif.

Keempat tanggung jawab, yaitu mematuhi prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan hukum yang berlaku dalam menjalankan perusahaan. Kelima independensi, merupakan prasyarat untuk melakukan manajemen yang profesional dengan tidak adanya benturan kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta tidak adanya pengaruh atau tekanan dari manajemen.

2.2.3 Dewan Komisaris Independen

Menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 57 /POJK.04/2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan efek, tidak ada wewenang mengendalikan perusahaan efek, berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota komisaris independen. Jumlah komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris atau jika dewan komisaris lebih dari dua orang. Peran dewan komisaris independen adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan manajemennya agar tidak melanggar peraturan (Sarra, 2017).

Komisaris independen merupakan anggota yang tidak memiliki hubungan kepemilikan saham, keuangan maupun yang memiliki wewenang untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Keberadaan komisaris independen ini mampu mengawasi kegiatan manajemen perusahaan karena mampu mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi tentang perusahaan kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip corporate governance yaitu transparansi.

2.2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan institusi yang sangat berkepentingan dengan investasi yang dilakukan, termasuk juga dengan investasi saham. Dalam pengelolaan investasi perusahaan, institusi biasanya menyerahkan tanggung jawab kepada departemen tertentu. Kegiatan pengendalian potensi oleh manajemen terlalu

tinggi karena adanya pantauan oleh lembaga profesional (Cahyono et al., 2016). Pada dasarnya kepemilikan institusional berusaha untuk memaksimalkan keuntungan agar memperoleh dividen yang cukup tinggi atau mengubahnya kembali menjadi ekuitas. Ini berkaitan jika dihubungkan dengan penghindaran pajak (Ashari et al., 2020).

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh institusi lain salah satunya pemerintahan. Keberadaan kepemilikan institusional ini mampu meningkatkan pengawasan dari pihak eksternal perusahaan sehingga dapat meminimalisir perilaku yang menyimpang oleh perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional dapat mendorong manajemen untuk menghindari pajak yang dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan..

2.2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Manajemen bertanggung jawab langsung atas operasional perusahaan, termasuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan (Ashari et al., 2020). Peran manajemen dalam menghasilkan laba perusahaan juga semakin tinggi, semakin banyak saham yang dimiliki manajemen perusahaan, maka semakin besar pengaruh manajemen perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak..

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu pihak manajemen akan berhati – hati dalam pengambilan kebijakan perusahaannya agar tidak berdampak buruk ke sahamnya. Karena besarnya kepemilikan manajerial juga akan meningkatkan praktik penghindaran pajak yang bisa menguntungkan bagi perusahaan

2.2.6 Komite Audit

Ikatan Komite Audit menyatakan komite audit merupakan sebuah komite yang bekerja secara profesional yang melakukan pengawasan pada laporan keuangan, audit dan tata kelola perusahaan. Tingginya kualitas corporate

governance di dalam perusahaan, dipengaruhi oleh tingginya jumlah komite audit (Triyanti et al., 2020).

Komite audit merupakan anggota yang memiliki wewenang untuk mengawasi audit eksternal laporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan perusahaan komite audit bertugas melakukan pengawasan sebagai bentuk perlindungan terhadap para pemegang saham.

2.2.7 Tax Avoidance

Tax avoidance didefinisikan sebagai sebuah model transaksi yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang – undang perpajakan pada suatu negara (Sari, 2014). Pemerintah di dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat, akan menciptakan rasio pajak yang dapat digunakan untuk melihat fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Kinerja pemungutan pajak yang baik dapat dilihat dari tingginya rasio pajak (Moeljono, 2020).

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan undang – undang. Penghindaran pajak seperti ini menguntungkan bagi perusahaan dikarenakan dapat meningkatkan laba perusahaan karena beban pajak berkurang. Oleh karena itu perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk membayar pajak lebih kecil dengan melakukan penghindaran pajak ini.

2.2.8 Landasan Hukum Islam

Pada masa Rasulullah SAW hukuman bagi penghindar, pembangkang dan pengelak zakat yaitu sanksi di dunia dan di akhirat, serta pada masa Khalifah Umar Bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar mereka diperangi dan ditagih (Emzaed et al., 2018) . Hadist Bukhari meriwayatkan bahwa umat muslim yang tidak mau membayar zakat akan memperoleh sanksi dunia dan akhirat

Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang dikaruniani oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat

menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu. Nabi kemudian membaca ayat: “Janganlah orang-orang sangat kikir dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka, segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat.”

Beberapa ulama seperti Qadhi Abu Bakar, Imam Syatibi, Imam Malik dan Ibn al – Aarabi memiliki pendapat bahwa ada kewajiban lain dalam harta kekayaan kita selain zakat. Adanya perbedaan pendapat ini menciptakan jalan tengah yakni zakat merupakan kewajiban atas harta yang kita miliki. Tetapi jika ada keperluan tambahan maka akan ada kewajiban tambahan yakni pajak (Surahman & Ilahi, 2017).

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At- Taubah:103).

Terdapat lima bahaya praktik penghindaran pajak, yaitu (Emzaed et al., 2018) :

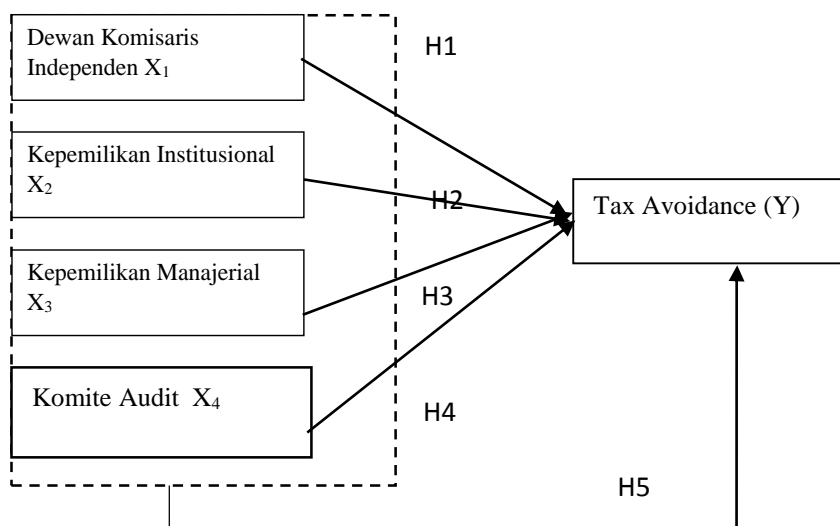
1. Mengurangi pendapatan pajak sehingga membahayakan keuangan negara.
2. Merugikan wajib pajak lain yang harus menanggung beban pajak sehingga adanya ketidakadilan antara wajib pajak.
3. Banyaknya penghindaran pajak menyebabkan negara menetapkan kewajiban pajak yang baru dan naiknya tarif pajak untuk menggantikan kekurangan pajak negara.
4. Hal itu berbahaya bagi kepentingan masyarakat, di mana berkurangnya keuangan negara sehingga menyebabkan terbengkelainya rencana yang bermanfaat.

5. Menyebabkan hilangnya kejujuran rusaknya jiwa dan solidaritas melemah karena jatuhnya akhlak

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Rohyana & Maryana (2021) dalam penelitiannya dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dikarenakan semakin tingginya proporsi jumlah dewan komisaris maka semakin baik pula kinerja pelaksanaan pengawasan manajemen di dalam perusahaan. Penelitian ini selaras dengan penelitian milik Sunarsih & Handayani (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₁ : Dewan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Wijayanti (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dikarenakan jumlah kepemilikan saham diatas 5%. Kepemilikan isntitusional berperan dalam melakukan pengawasan manajerial, karena semakin besar tingkat pengawasan manajerial maka menunjukkan tingginya tingkat kepemilikan saham institusional. Hasil ini juga sama dengan penelitian milik Krisna (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₂ Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Ashari et al. (2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pihak manajemen memiliki peran dalam operasional perusahaan serta dalam penentuan kebijakan akuntansi perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pihak manajemen perusahaan melakukan *tax avoidance*. Manajemen sebagai pemegang saham perusahaan akan berhati – hati dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak supaya tidak berdampak buruk terhadap sahamnya (Sunarsih & Handayani, 2016).

H₃ : Kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Nugraheni & Pratomo (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh besar atau kecilnya jumlah komite audit.

H₄ : Komisi Audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*

2.4.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Rohyana & Maryana (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Penerapan *corporate governance* yang baik, akan berdampak baik pula bagi kegiatan operasional perusahaan. Sehingga secara simultan *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Dewi, 2019).

H₅ : Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisi audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada penggunaan angka dan perhitungan statistik.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Bursa Efek Indonesia untuk mengambil data yang diperlukan di dalam melakukan penelitian. Pengambilan data diperoleh melalui situs www.idx.co.id

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekumpulan subjek, variabel, konsep, dan fenomena. Kita dapat memeriksa setiap anggota populasi untuk menentukan sifat populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode tahun 2016 – 2020. Populasi keseluruhan berjumlah 206 perusahaan.

Tabel 3.1
Daftar Populasi Perusahaan Jasa Periode 2016 – 2020

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Bundamedik Tbk	BMHS
2	Diagnos Laboratorium Utama Tbk	DGNS
3	Kedoya Adyaraya Tbk	RSGK
4	Medikaloka Hermina Tbk	HEAL
5	Metro Healthcare Indonesia Tbk	CARE
6	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	MIKA
7	Prodia Widyahusada Tbk	PRDA
8	Royal Prima Tbk	PRIM

9	Sarana Meditama Metropolita Tbk	SAME
10	Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk	SRAJ
11	Siloam International Hospitals Tbk	SILO
12	ABM Investama Tbk	ABMM
13	Bakrie & Brother Tbk	BNBR
14	Bumi Resources Minerals Tbk	BRMS
15	Charnic Capital Tbk	NICK
16	Global Mediacom Tbk	BMTR
17	Hanson International Tbk	MYRX
18	MNC Investama Tbk	BHIT
19	Multipolar Tbk	MLPL
20	Polaris Investama Tbk	PLAS
21	Pool Advista Indonesia Tbk	POOL
22	Saham Seri B Hanson International Tbk	MYRXP
23	Saratoga Investama Sedaya Tbk	SRTG
24	Andalan Perkasa Abadi Tbk	NASA
25	Bayu Buana Tbk	BAYU
26	Bukit Uluwatu Villa Tbk	BUVA
27	Champ Resto Indonesia Tbk	ENAK
28	Cipta Selera Murni Tbk	CSMI
29	Citra Putra Realty Tbk	CLAY
30	Dafam Property Indonesia Tbk	DFAM
31	Destinasi Tirta Nusantara Tbk	PDES
32	Eastparc Hotel Tbk	EAST
33	Esta Multi Usaha Tbk	ESTA
34	Fast Food Indonesia Tbk	FAST
35	Grahamas Citrawisata Tbk	GMCW
36	Hotel Fitra International Tbk	FITT
37	Hotel Mandarine Regency Tbk	HOME
38	Hotel Sahid Jaya International Tbk	SHID
39	Indonesian Paradise Property Tbk	INPP
40	Island Concepts Indonesia Tbk	ICON
41	Jakarta International Hotels & Development Tbk	JIHD
42	Jakarta Setiabudi Internasional Tbk	JSPT
43	Jaya Bersama Indo Tbk	DUCK
44	MAP Boga Adiperkasa Tbk	MAPB
45	Mas Murni Indonesia Tbk	MAMI
46	Mas Murni Indonesia Tbk (Saham Preferen)	MAMIP
47	Menteng Heritage Realty Tbk	HRME
48	MNC Land Tbk	KPIG
49	Nara Hotel International Tbk	NARA
50	Pakuan Tbk	UANG
51	Panorama Sentrawisata Tbk	PANR
52	Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk	PGLI

53	Pembangunan Jaya Ancol Tbk	PJAA
54	Pioneerindo Gourmet Intenational Tbk	PTSP
55	Planet Properindo Jaya Tbk	PLAN
56	Pudjiadi & Sons Tbk	PNSE
57	Red Planet Indonesia Tbk	PSKT
58	Sanurhasta Mitra Tbk	MINA
59	Saraswati Griya Lestari Tbk	HOTL
60	Sarimelati Kencana Tbk	PZZA
61	Satria Mega Kencana Tbk	SOTS
62	Sinergi Megah Internusa Tbk	NUSA
63	Sunter Lakeside Hotel Tbk	SNLK
64	Surya Permata Andalan Tbk	NATO
65	Tourindo Guide Indonesia Tbk	PGJO
66	Digital Mediatama Maxima Tbk.	DMMX
67	Elang Mahkota Teknologi Tbk.	EMTK
68	First Media Tbk.	KBLV
69	Fortune Indonesia Tbk.	FORU
70	Graha Layar Prima Tbk.	BLTZ
71	Indosiar Karya Media Tbk.	IDKM
72	Intermedia Capital Tbk.	MDIA
73	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.	JTPE
74	Link Net Tbk.	LINK
75	Mahaka Media Tbk.	ABBA
76	Mahaka Radio Integra Tbk.	MARI
77	MD Pictures Tbk.	FILM
78	Media Nusantara Citra Tbk.	MNCN
79	MNC Sky Vision Tbk.	MSKY
80	MNC Studios International Tbk.	MSIN
81	MNC Vision Networks Tbk.	IPTV
82	Net Visi Media Tbk.	NETV
83	Solusi Sinergi Digital Tbk.	WIFI
84	Star Pacific Tbk.	LPLI
85	Surya Citra Media Tbk.	SCMA
86	Tempo Intimedia Tbk.	TMPO
87	Visi Media Asia Tbk.	VIVA
88	Anabatic Technologies Tbk	ATIC
89	Arkadia Digital Media Tbk	DIGI
90	Astra Graphia Tbk.	ASGR
91	Bukalapak.com Tbk.	BUKA
92	Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.	CASH
93	DCI Indonesia Tbk.	DCII
94	Envy Technologies Indonesia Tbk.	ENVY
95	Galva Technologies Tbk.	GLVA
96	Gelombang Seismic Indonesia Tbk.	GSI

97	Global Sukses Solusi Tbk.	RUNS
98	Indointernet Tbk.	EDGE
99	Indoritel Makmur Internasional Tbk.	DNET
100	Indosterling Technomedia Tbk.	TECH
101	Limas Indonesia Makmur Tbk.	LMAS
102	Metrodata Electronics Tbk.	MTDL
103	Multipolar Technology Tbk.	MLPT
104	Sentral Mitra Informatika Tbk.	LUCK
105	Trimegah Karya Pratama Tbk.	UVCR
106	Wira Global Solusi Tbk.	WGSB
107	Zyrexindo Mandiri Buana Tbk.	ZYRX
108	Aesler Grup Internasional Tbk.	RONY
109	Bali Bintang Sejahtera Tbk.	BOLA
110	Dyandra Media International Tbk.	DYAN
111	Gema Grahasarana Tbk.	GEMA
112	Marga Abhinaya Abadi Tbk.	MABA
113	Multifiling Mitra Indonesia Tbk.	MFMI
114	Shield On Service Tbk.	SOSS
115	Sugih Energy Tbk.	SUGI
116	Surya Fajar Capital Tbk.	SFAN
117	Yelooo Integra Datanet Tbk.	YELO
118	Ace Hardware Indonesia Tbk.	ACES
119	Artajasa Pembayaran Elektronis Tbk.	ARTAJASA
120	Catur Sentosa Adiprana Tbk.	CSAP
121	Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.	CENT
122	Damai Sejahtera Abadi Tbk.	UFOE
123	Distribusi Voucher Nusantara Tbk.	DIVA
124	Duta Intidaya Tbk.	DAYA
125	Electronic City Indonesia Tbk.	ECII
126	Era Graharealty Tbk.	IPAC
127	Erajaya Swasembada Tbk.	ERAA
128	Globe Kita Terang Tbk.	GLOB
129	Great River International Tbk.	GRIV
130	Hero Supermarket Tbk.	HERO
131	Imago Mulia Persada Tbk.	LFLO
132	Kioson Komersial Indonesia Tbk.	KIOS
133	Kokoh Inti Arebama Tbk.	KOIN
134	Lima Dua Lima Tiga Tbk.	LUCY
135	M Cash Integrasi Tbk.	MCAS
136	MAP Aktif Adiperkasa Tbk.	MAPA
137	Matahari Courts Tbk.	MACO
138	Matahari Department Store Tbk.	LPPF
139	Matahari Putra Prima Tbk.	MPPA
140	Midi Utama Indonesia Tbk.	MIDI

141	Mitra Adiperkasa Tbk.	MAPI
142	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.	MKNT
143	NFC Indonesia Tbk.	NFCX
144	Northcliff Citra Nusa Indonesia Tbk.	SKYB
145	Nusatama Berkah Tbk.	NTBK
146	Optima Prima Metal Sinergi Tbk.	OPMS
147	Panca Anugrah Wisesa Tbk.	MGLV
148	Ramayana Lestari Sentosa Tbk.	RALS
149	Rimo International Lestari Tbk.	RIMO
150	Sona Topas Tourism Industry Tbk.	SONA
151	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	AMRT
152	Supra Boga Lestari Tbk.	RANC
153	Tiphone Mobile Indonesia Tbk.	TELE
154	Trikonsel Oke Tbk.	TRIO
155	Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.	GOLD
156	Agro Yasa Lestari Tbk	AYLS
157	AirAsia Indonesia Tbk.	CMPP
158	Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.	AIMS
159	AKR Corporindo Tbk.	AKRA
160	Ancora Indonesia Resources Tbk.	OKAS
161	Arita Prima Indonesia Tbk.	APII
162	Asia Natural Resources Tbk.	ASIA
163	Berkah Prima Perkasa Tbk.	BLUE
164	Bintang Mitra Semestaraya Tbk.	BMSR
165	Bintang Oto Global Tbk.	BOGA
166	Colorpak Indonesia Tbk.	CLPI
167	Darmi Bersaudara Tbk.	KAYU
168	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	DSSA
169	Dua Putra Utama Makmur Tbk.	DPUM
170	Dwi Guna Laksana Tbk.	DWGL
171	Enseval Putera Megatrading Tbk.	EPMT
172	Evergreen Invesco Tbk.	GREN
173	Exploitasi Energi Indonesia Tbk.	CNKO
174	FKS Multi Agro Tbk.	FISH
175	Hensel Davest Indonesia Tbk.	HDIT
176	Hexindo Adiperkasa Tbk.	HEXA
177	HK Metals Utama Tbk.	HKMU
178	Indah Prakasa Sentosa Tbk.	INPS
179	Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk.	CARS
180	Inter Delta Tbk.	INTD
181	Intraco Penta Tbk.	INTA
182	Itama Ranoraya Tbk.	IRRA
183	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.	JKON
184	Kobexindo Tractors Tbk.	KOBX

185	Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.	KMDS
186	Lautan Luas Tbk.	LTLS
187	Leo Investments Tbk.	ITTG
188	Millennium Pharmacon International Tbk.	SDPC
189	Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	MPMX
190	Modern Internasional Tbk.	MDRN
191	Multi Indocitra Tbk.	MICE
192	Perdana Bangun Pusaka Tbk.	KONI
193	Putra Mandiri Jembar Tbk.	PMJS
194	Sigmatgold Inti Perkasa Tbk.	TMPI
195	Singleterra Tbk.	SING
196	Sumber Global Energy Tbk.	SGER
197	Surya Pertiwi Tbk.	SPTO
198	Telefast Indonesia Tbk.	TFAS
199	Tigaraksa Satria Tbk.	TGKA
200	Tira Austenite Tbk.	TIRA
201	Triwira Insanlestari Tbk.	TRIL
202	Tunas Ridean Tbk.	TURI
203	United Tractors Tbk.	UNTR
204	Wahana Pronatural Tbk.	WAPO
205	Wicaksana Overseas International Tbk.	WICO
206	Wilton Makmur Indonesia Tbk.	SQMI

Sumber: <https://sahamidx.com/> (data diolah peneliti, 2022)

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

- a. Perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 -2020
- b. Perusahaan jasa yang mempublikasikan laporan keuangannya selama periode tahun 2016 – 2020
- c. Perusahaan jasa memiliki data yang sesuai untuk penelitian ini
- d. Perusahaan jasa yang menerbitkan laporan keuangan dalam rupiah dan berakhir pada tanggal 31 desember.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu mengumpulkan data berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memperoleh sampel dengan kriteria yang diinginkan dalam sampel tersebut. Penentuan jumlah sampel sesuai dengan rumus Slovin.

$$\begin{aligned}
 N &= \frac{n}{(1+(n \times e^2))} \\
 &= \frac{206}{(1+(206 \times 0,05^2))} \\
 &= \frac{206}{(1+(206 \times 0,0025))} \\
 &= \frac{206}{(1+0,515)} = \frac{206}{1,515} = 135,9735
 \end{aligned}$$

Menurut perhitungan sampel yang harus diambil minimal sebesar 136. Tetapi, agar memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan bisa mewakili keseluruhan atau sebagian objek penelitian maka akan diambil jumlah sampel 140.

Tabel 3. 2
Teknik Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2020	206
2	Perusahaan belum terdaftar di BEI sebelum tahun 2016 dan tidak memiliki data penelitian yang lengkap	(101)
3	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah	(2)

	Total perusahaan	103
	Total sampel (103 perusahaan x 5 tahun)	515

Sumber: www.idnfinancials.com (data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan dari kriteria yang telah dijelaskan, maka perusahaan yang bisa menjadi sampel penelitian ini adalah:

Tabel 3.3

Daftar Perusahaan Sampel Penelitian Periode 2016 – 2020

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	BAYU	Bayu Buana Tbk.
2	BHIT	MNC Investama Tbk.
3	BMTR	Global Mediacom Tbk.
4	BNBR	Bakrie & Brothers Tbk.
5	HOTL	Saraswati Griya Lestari Tbk.
6	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
7	SRTG	Saratoga Investama Sedaya Tbk.
8	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk.
9	KPIG	MNC Land Tbk.
10	PANR	Panorama Sentrawisata Tbk.
11	MTDL	Metrodata Electronics Tbk.
12	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.
13	MDIA	Intermedia Capital Tbk.
14	RANC	Supra Boga Lestari Tbk.
15	RAIS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
16	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk.
17	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.
18	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk.
19	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
20	APII	Arita Prima Indonesia Tbk.
21	CLPI	Colorpak Indonesia Tbk.
22	INTD	Inter Delta Tbk.
23	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
24	LTLS	Lautan Luas Tbk.
25	MPMX	Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
26	MICE	Multi Indocitra Tbk.
27	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
28	UNTR	United Tractors Tbk.

Sumber: www.idnfinancials.com (data diolah peneliti, 2022)

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui pihak ketiga berupa laporan keuangan yang dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Sumber data laporan tahunan berasal dari perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2016 – 2020.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data berasal dari website Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan tahunan perusahaan, penelitian sebelumnya dan berbagai website resmi.

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak secara legal menurut undang – undang. Tax avoidance menggunakan pengukuran cash effective tax rate (CETR). Rumus perhitungan CETR yaitu sebagai berikut (Wijayanti, 2016).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

3.7.2 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris Independen disini merupakan proporsi komisaris independen dalam suatu dewan komisaris perusahaan. Independensi dewan komisaris diukur dengan rumus sebagai berikut (Prasetyo & Pramuka, 2018).

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.7.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham milik institusi lain. Kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut: (Prasetyo & Pramuka, 2018).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100\%$$

3.7.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham milik manajemen. Kepemilikan manajerial diukur dengan rumus sebagai berikut: (Prasetyo & Pramuka, 2018).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham Manajemen}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100\%$$

3.7.5 Komite Audit

Komite audit merupakan anggota yang melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Komite audit diukur menggunakan rumus sebagai berikut: (Hapsari Ardianti, 2019).

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

Tabel 3.4
Tabel Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Tax Avoidance	$\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$	Rasio
Dewan Komisaris Independen	$\frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
Kepemilikan Institusional	$\frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100\%$	Rasio
Kepemilikan Manajerial	$\frac{\sum \text{Saham Manajemen}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100\%$	Rasio
Komite Audit	$\sum \text{Komite Audit}$	Rasio

3.8 Analisis Data

Riset kasual digunakan dalam metode analisis penelitian ini. Riset kasual digunakan sebagai bentuk pembuktian dalam hubungan sebab akibat maupun hubungan mempengaruhi dipengaruhi dari variabel yang diteliti.

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

3.8.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji normal tidaknya distribusi sebaran data. Uji normalitas dilakukan dengan dua cara, yakni analisis grafik dan uji statistik (Prasetyo & Pramuka, 2018). Analisis grafik dapat dilihat melalui grafik histogram dan *normal probability plot* yaitu membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Jika data atau titik-titik disekitar garis diagonal tersebar mengikuti garis diagonalnya maka data tersebut bisa dikatakan terdistribusi secara normal. Sedangkan uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual

adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Data terdistribusi secara normal apabila *asymptotic significance* $> 0,05$.

3.8.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independent maka bisa disebut model regresi tersebut baik. Variabel independen disebut tidak ortogonal apabila tidak saling berkorelasi. Variabel ortogonal merupakan variabel independent yang nilai korelasi antar sesama variabel independent sama dengan nol. Uji ini bisa dilakukan dengan melihat nilai VIF yang apabila nilainya < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan cara melihat grafik Scatter Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika terbentuk pola tertentu dengan titik – titik maka terjadi heterokedastisitas dan jika titik – titik tidak membentuk pola serta menyebar diantara sumbu Y dan dibawah angka nol maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.8.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residual (anggota) pada serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode tertentu. Uji autokorelasi menggunakan metode uji Durbin Watson. Jika nilai $DW > DU$ dan $(4-DW) > DU$ atau $(4-DW) > DU < DW$ maka bisa dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : Tidak ada autokorelasi ($r=0$)

H_A : Ada autokorelasi ($r \neq 0$)

3.8.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi nilai pengaruh variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

Rumus regresi linear berganda: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$

Keterangan:

- Y = *Tax Avoidance* (Cash ETR)
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X1 = Proporsi Dewan Komisaris Independen
- X2 = Kepemilikan Institusional
- X3 = Kepemilikan Manajerial
- X4 = Komite Audit
- e = *Error*

3.8.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent mengungkapkan variabel dependent. Semakin tingginya R^2 diakibatkan adanya penambahan variabel meskipun variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Para peneliti menganjurkan menggunakan nilai adjusted R^2 sebagai alat regresi. Jika ada penambahan satu variabel independen, maka nilai adjusted R^2 bisa naik maupun turun. Meskipun nilai yang diinginkan bernilai positif, tetapi nilai adjusted R^2 dapat bernilai negatif yang artinya nilainya dianggap nol.

3.8.2.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t merupakan alat untuk mengukur pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Pengukuran uji t menggunakan perbandingan antara t tabel dan t hitung yang menunjukkan angka probabilitas dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika angka probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel terikat tidak dipengaruhi secara individual oleh variabel bebas. Jika angka probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas secara individual (S. Santoso, 2009)

3.8.3.3 Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik f merupakan alat untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Pengukuran uji f menggunakan perbandingan antara f tabel dan f hitung yang menunjukkan angka probabilitas dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika angka probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak yang artinya variabel terikat tidak dipengaruhi oleh variabel bebas secara bersamaan. Jika angka probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima yang artinya variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas secara bersamaan (S. Santoso, 2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 – 2020. Penelitian ini menggunakan program SPSS 21 sebagai alat untuk mengolah data. Penentuan sample menggunakan purposive sampling dengan jumlah populasi sebanyak 206 perusahaan dan sampel sebanyak 28 perusahaan. Seluruh perusahaan diklasifikasikan ke dalam delapan sektor diantaranya:

1. *Advertising, printing & media*
2. *Computer & services*
3. *Healthcare*
4. *Investment company*
5. *Retail trade*
6. *Restaurant, hotel & tourism*
7. *Wholesale*
8. *Others trade, services & investment*

Tabel 4.1
Teknik Pngambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2020	206
2	Perusahaan belum terdaftar di BEI sebelum tahun 2016 dan tidak memiliki data penelitian yang lengkap	(101)

3	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah	(2)
	Total perusahaan	103
	Total sampel (103 perusahaan x 5 tahun)	515

Sumber: www.idnfinancials.com (data diolah peneliti, 2022)

$$\begin{aligned}
 N &= \frac{n}{(1+(n \times e^2))} \\
 &= \frac{206}{(1+(206 \times 0,05^2))} \\
 &= \frac{206}{(1+(206 \times 0,0025))} \\
 &= \frac{206}{(1+0,515)} = \frac{206}{1,515} = 135,9735
 \end{aligned}$$

Menurut perhitungan sampel yang harus diambil minimal sebesar 136. Tetapi, agar memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan bisa mewakili keseluruhan atau sebagian objek penelitian maka akan diambil jumlah sampel 140.

Tabel 4.2

Daftar Perusahaan Sampel Penelitian Periode 2016 – 2020

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	BAYU	Bayu Buana Tbk.
2	BHIT	MNC Investama Tbk.
3	BMTR	Global Mediacom Tbk.
4	BNBR	Bakrie & Brothers Tbk.
5	HOTL	Saraswati Griya Lestari Tbk.
6	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
7	SRTG	Saratoga Investama Sedaya Tbk.
8	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk.
9	KPIG	MNC Land Tbk.
10	PANR	Panorama Sentrawisata Tbk.
11	MTDL	Metrodata Electronics Tbk.
12	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.

13	MDIA	Intermedia Capital Tbk.
14	RANC	Supra Boga Lestari Tbk.
15	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
16	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk.
17	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.
18	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk.
19	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
20	APII	Arita Prima Indonesia Tbk.
21	CLPI	Colorpak Indonesia Tbk.
22	INTD	Inter Delta Tbk.
23	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
24	LTLS	Lautan Luas Tbk.
25	MPMX	Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
26	MICE	Multi Indocitra Tbk.
27	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
28	UNTR	United Tractors Tbk.

Sumber: www.idnfinancials.com (data diolah peneliti, 2022)

4.1.2 Persiapan Analisis Data

Perhitungan pada masing – masing variabel menggunakan alat bantu Microsoft Excel. Berikut merupakan hasil perhitungan dari masing – masing variabel:

4.1.2.1 Dewan Komisaris Independen

Ilustrasi perhitungan dewan komisaris independen pada PT. Bayu Buana Tbk. pada tahun 2016:

$$\begin{aligned}
 \text{Dewan Komisaris Independen} &= \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{3} \times 100\% \\
 &= 0,333 = 33\%
 \end{aligned}$$

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Data Dewan Komisaris Independen

No	Kode Perusahaan	Dewan Komisaris Independen				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAYU	33%	33%	33%	33%	33%
2	BHIT	40%	33%	33%	33%	40%
3	BMTR	60%	75%	75%	75%	75%
4	BNBR	33%	33%	33%	50%	33%
5	HOTL	50%	50%	50%	50%	50%
6	MIKA	40%	40%	67%	67%	67%
7	SRTG	40%	40%	40%	40%	40%
8	ICON	33%	33%	33%	33%	50%
9	KPIG	40%	40%	40%	40%	50%
10	PANR	40%	40%	40%	40%	33%
11	MTDL	50%	50%	50%	50%	50%
12	JTPE	100%	100%	100%	50%	50%
13	MDIA	50%	67%	33%	67%	200%
14	RANC	50%	50%	50%	50%	50%
15	RALS	67%	67%	67%	50%	50%
16	MIDI	100%	50%	100%	100%	100%
17	ERAA	50%	50%	50%	100%	50%
18	CSAP	67%	50%	50%	50%	67%
19	AKRA	50%	50%	50%	50%	50%
20	APII	50%	50%	50%	50%	50%
21	CLPI	50%	50%	50%	50%	50%
22	INTD	50%	50%	50%	100%	100%
23	JKON	67%	67%	50%	67%	50%
24	LTLS	100%	100%	100%	100%	67%
25	MPMX	50%	50%	50%	50%	67%
26	MICE	50%	50%	50%	50%	50%
27	TGKA	33%	33%	33%	100%	33%
28	UNTR	50%	100%	50%	50%	50%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan persentase dewan komisaris independen pada masing – masing sampel selama 5 tahun. Nilai terendah untuk setiap tahun berada pada angka 33% yang diperoleh PT. Bayu Buana Tbk pada tahun 2016 – 2020, PT. MNC Investama Tbk pada tahun 2017 – 2019, PT. Bakrie & Brothers Tbk pada tahun 2016 – 2018 dan 2020, PT. Island Concepts Indonesia Tbk pada tahun 2016 – 2019, PT. Panorama Sentrawisata Tbk pada tahun 2020, PT. Intermedia Capital Tbk pada tahun 2018, dan PT. Tigaraksa Satria Tbk pada tahun

2016, 2018 dan 2020. Nilai terendah untuk tahun 2016 - 2019 berada pada angka 100% yang diperoleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk pada tahun 2016 – 2018, PT. Midi Utama Indonesia Tbk pada tahun 2016, 2018 dan 2019, PT. Erajaya Swasembada Tbk pada tahun 2019, PT. Inter Delta Tbk pada tahun 2019, PT. Lautan Luas Tbk pada tahun 2016 – 2019, PT. Tigaraksa Satria Tbk pada tahun 2019, PT. United Tractors Tbk pada tahun 2017. Hasil perhitungan dewan komisaris independen secara lengkap berada pada lampiran.

4.1.2.2 Kepemilikan Institusional

Ilustrasi perhitungan kepemilikan institusional pada PT. Bayu Buana Tbk. pada tahun 2016:

$$\begin{aligned} \text{Kepemilikan Institusional} &= \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}262.442.807}{\text{Rp}353.220.780} \times 100\% \\ &= 0,743 = 74\% \end{aligned}$$

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Data Kepemilikan Institusional

No	Kode Perusahaan	Kepemilikan Institusional				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAYU	74%	63%	63%	68%	68%
2	BHIT	56%	57%	60%	51%	46%
3	BMTR	53%	53%	53%	49%	45%
4	BNBR	46%	52%	176%	157%	54%
5	HOTL	82%	82%	82%	82%	56%
6	MIKA	60%	60%	61%	62%	62%
7	SRTG	32%	33%	32%	33%	33%
8	ICON	32%	37%	37%	32%	40%
9	KPIG	49%	46%	43%	34%	47%
10	PANR	79%	79%	64%	64%	64%
11	MTDL	25%	36%	36%	42%	42%
12	JTPE	66%	66%	66%	66%	66%
13	MDIA	10%	10%	90%	90%	90%
14	RANC	74%	75%	75%	74%	74%
15	RALS	61%	62%	56%	56%	56%
16	MIDI	87%	87%	87%	87%	10%

17	ERAA	60%	60%	55%	55%	55%
18	CSAP	71%	71%	55%	85%	86%
19	AKRA	59%	58%	59%	59%	60%
20	APII	17%	72%	72%	72%	72%
21	CLPI	66%	58%	58%	58%	58%
22	INTD	58%	58%	58%	55%	55%
23	JKON	61%	61%	61%	61%	61%
24	LTLS	54%	53%	53%	53%	55%
25	MPMX	71%	71%	71%	74%	62%
26	MICE	45%	45%	45%	45%	45%
27	TGKA	99%	98%	98%	98%	98%
28	UNTR	59%	59%	59%	59%	59%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan kepemilikan institusional pada masing – masing sampel selama 5 tahun. Pada tahun 2016 - 2017 nilai terendah diperoleh PT. Midi Utama Indonesia Tbk sebesar 10%, sedangkan nilai tertinggi diperoleh PT. Tigaraksa Satria Tbk sebesar 99% dan 98%. Pada tahun 2018 nilai terendah diperoleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk sebesar 32%, sementara pada tahun 2019 nilai terendah diperoleh PT. Island Concepts Indonesia Tbk sebesar 32%. Pada tahun 2018 – 2019 PT. Bakhri & Brother Tbk memperoleh nilai tertinggi sebesar 176% dan 157%. Pada tahun 2020 nilai terendah diperoleh PT. Midi Utama Indonesia Tbk sebesar 10%, sementara nilai tertinggi diperoleh PT. Tigaraksa Satria Tbk sebesar 98%. Hasil perhitungan kepemilikan institusional secara lengkap berada pada lampiran.

4.1.2.3 Kepemilikan Manajerial

Ilustrasi perhitungan kepemilikan institusional pada PT. Bayu Buana Tbk. pada tahun 2016:

$$\begin{aligned}
 \text{Kepemilikan Institusional} &= \frac{\sum \text{Saham Manajemen}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp}30.609.000}{\text{Rp}353.220.780} \times 100\% \\
 &= 0,087 = 9\%
 \end{aligned}$$

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Data Kepemilikan Manajerial

No	Kode Perusahaan	Kepemilikan Manajerial				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAYU	9%	7%	7%	7%	7%
2	BHIT	5%	5%	5%	3%	3%
3	BMTR	1%	1%	1%	1%	1%
4	BNBR	0%	0%	0%	0%	0%
5	HOTL	3%	3%	3%	3%	26%
6	MIKA	0%	0%	0%	0%	0%
7	SRTG	59%	59%	54%	53%	55%
8	ICON	36%	36%	36%	40%	40%
9	KPIG	2%	1%	1%	1%	1%
10	PANR	3%	3%	4%	4%	3%
11	MTDL	24%	24%	24%	24%	24%
12	JTPE	7%	7%	7%	7%	7%
13	MDIA	0%	0%	0%	0%	0%
14	RANC	5%	5%	5%	5%	5%
15	RALS	4%	8%	7%	7%	7%
16	MIDI	1%	1%	1%	1%	1%
17	ERAA	0%	0%	0%	0%	0%
18	CSAP	4%	7%	3%	3%	6%
19	AKRA	1%	1%	1%	1%	1%
20	APII	58%	6%	6%	6%	6%
21	CLPI	7%	7%	7%	7%	7%
22	INTD	28%	30%	31%	33%	33%
23	JKON	2%	3%	0%	3%	1%
24	LTLS	3%	3%	4%	4%	3%
25	MPMX	3%	3%	3%	3%	3%
26	MICE	16%	15%	9%	11%	11%
27	TGKA	0%	1%	1%	1%	0%
28	UNTR	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan persentase dewan komisaris independen pada masing – masing sampel selama 5 tahun. Nilai terendah untuk setiap tahun berada pada angka 0% yang diperoleh PT. Bakrie & Brothers Tbk, PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, PT. Intermedia Capital Tbk, PT. Erajaya Swasembada Tbk dan PT. United Tractors Tbk masing – masing pada tahun 2016 – 2020. Serta diperoleh juga oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk pada tahun 2018 dan PT. Tigaraksa Satria Tbk pada tahun 2016 dan 2020. Sementara itu

untuk nilai tertinggi setiap tahunnya diperoleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk dengan nilai masing – masing 59%, 59%, 54%, 53% dan 55%. Hasil perhitungan kepemilikan manajerial secara lengkap berada pada lampiran.

4.1.2.4 Komite Audit

Ilustrasi perhitungan komite audit pada PT. Bayu Buana Tbk. pada tahun 2016:

$$\begin{aligned} \text{Kepemilikan Institusional} &= \sum \text{Komite Audit} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Data Komite Audit

No	Kode Perusahaan	Komite Audit				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAYU	3	3	3	3	3
2	BHIT	5	3	5	5	5
3	BMTR	6	6	5	5	5
4	BNBR	4	4	3	3	3
5	HOTL	2	2	2	1	1
6	MIKA	3	3	3	3	3
7	SRTG	3	3	3	3	3
8	ICON	3	3	3	3	3
9	KPIG	3	3	3	3	3
10	PANR	3	3	3	3	3
11	MTDL	3	3	3	3	3
12	JTPE	3	3	3	3	3
13	MDIA	3	3	3	3	3
14	RANC	3	3	3	3	3
15	RALS	3	3	3	3	3
16	MIDI	3	3	3	3	3
17	ERAA	3	3	3	4	3
18	CSAP	3	3	3	3	3
19	AKRA	3	3	3	3	3
20	APII	3	3	3	3	3
21	CLPI	3	3	3	3	3
22	INTD	3	3	3	3	3

23	JKON	3	3	3	3	3
24	LTLS	3	3	3	3	3
25	MPMX	3	3	3	3	3
26	MICE	3	3	3	3	3
27	TGKA	3	4	4	4	3
28	UNTR	3	3	3	3	3

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan jumlah komite audit pada masing – masing sampel selama 5 tahun. Pada tahun 2016 – 2017 nilai komite audit terendah diperoleh PT. Saraswati Griya Lestari sejumlah dua komite audit, sementara nilai tertinggi diperoleh oleh PT. Global Mediacom Tbk sejumlah enam komite audit. Pada tahun 2018 – 2020 nilai terendah diperoleh PT. Saraswati Griya Lestari sejumlah 2, 1, 1, sementara nilai tertinggi diperoleh oleh PT. MNC Investama Tbk dan PT. Global Mediacom Tbk sejumlah lima komite audit.

4.1.2.5 Tax Avoidance

Ilustrasi perhitungan *tax avoidance* pada PT. Bayu Buana Tbk pada tahun 2016:

$$\begin{aligned}
 \text{Tax Avoidance} &= \frac{\sum \text{Pembayaran Pajak}}{\sum \text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp}9.724.574.457}{\text{Rp}35.311.445.269} \times 100\% \\
 &= 0,743 = 74\%
 \end{aligned}$$

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Data *Tax Avoidance*

No	Kode Perusahaan	CETR				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAYU	28%	18%	22%	9%	125%
2	BHIT	38%	65%	51%	26%	80%
3	BMTR	42%	34%	39%	54%	62%
4	BNBR	4%	8%	6%	21%	9%
5	HOTL	3%	203%	0%	88%	13%
6	MIKA	27%	29%	29%	36%	28%
7	SRTG	0%	3%	2%	1%	0%
8	ICON	122%	30%	30%	7%	45%

9	KPIG	4%	3%	6%	22%	10%
10	PANR	38%	37%	179%	137%	4%
11	MTDL	43%	30%	28%	30%	2%
12	JTPE	23%	25%	24%	15%	46%
13	MDIA	99%	8%	72%	33%	37%
14	RANC	5%	31%	21%	9%	9%
15	RALS	8%	19%	10%	24%	10%
16	MIDI	22%	47%	20%	14%	22%
17	ERAA	7%	5%	47%	46%	32%
18	CSAP	55%	58%	72%	139%	81%
19	AKRA	34%	84%	138%	131%	56%
20	APII	32%	42%	16%	39%	53%
21	CLPI	28%	55%	75%	27%	30%
22	INTD	37%	35%	57%	85%	32%
23	JKON	18%	0%	20%	29%	71%
24	LTLS	65%	23%	11%	1%	35%
25	MPMX	39%	28%	284%	125%	42%
26	MICE	25%	11%	87%	29%	57%
27	TGKA	29%	25%	21%	22%	16%
28	UNTR	30%	19%	25%	44%	48%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan nilai *tax avoidance* pada masing – masing sampel selama 5 tahun. Nilai *tax avoidance* terendah pada tahun 2016 diperoleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk sebesar 0%, sementara nilai tertinggi diperoleh PT. Island Concepts Indonesia Tbk 122%. Pada tahun 2017 nilai terendah diperoleh PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk sebesar 0%, sementara nilai tertinggi diperoleh PT. Saraswati Griya Lestari Tbk sebesar 203%. Pada tahun 2018 nilai terendah diperoleh PT. Saraswati Griya Lestari Tbk sebesar 0%, sementara nilai tertinggi diperoleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk sebesar 284%. Pada tahun 2019 nilai terendah diperoleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT. Lautan Luas Tbk sebesar 1% sementara nilai tertinggi diperoleh PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk sebesar 139%. Pada tahun 2020 nilai terendah diperoleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk sebesar 0%, sementara nilai tertinggi diperoleh PT. Bayu Buana Tbk sebesar 125%. Hasil perhitungan *tax avoidance* secara lengkap berada pada lampiran.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan di dalam penelitian ini terdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Asumsi dalam penelitian ini yakni data terdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,20585820
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,078
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,121 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test diperoleh hasil Asymp. Sig sebesar 0,121. Sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti telah memenuhi syarat dalam uji normalitas. Data

di dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk digunakan dalam uji regresi.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas di dalam penelitian ini. Pengujian multikolonieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai VIF dan *tolerance*. Asumsi dalam penelitian ini yakni data tidak terjadi multikolonieritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics		
		B	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,633		
	Kepemilikan Instusional	,051	,847	1,181
	Dewan Komisaris Independen	,044	,974	1,027
	Kepemilikan Manajerial	,068	,808	1,237
	Komite Audit	,024	,939	1,065

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas menunjukkan nilai VIF untuk setiap variabel lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10. Sehingga nilai tersebut telah memenuhi syarat dalam uji multikolonieritas. Data di dalam penelitian ini tidak terdapat multikolonieritas dan layak untuk digunakan dalam uji regresi.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar data sampel yang diurutkan berdasarkan waktu atau untuk mendeteksi adanya kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ di dalam penelitian ini. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Durbin Watson*. Asumsi dalam penelitian ini yakni data tidak terjadi autokorelasi apabila nilai $dU < d < 4-dU$.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b		
Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,20889	1,967

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: diolah peneliti, 2022

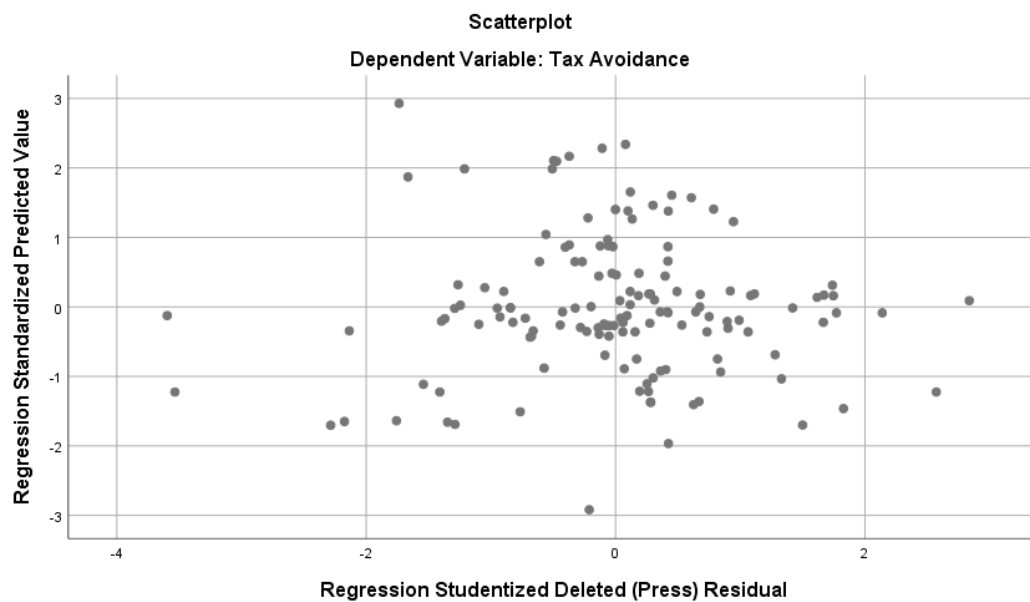
Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai *durbing watson* sebesar 1,967. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini apabila $dU < d < 4-dU$ yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sementara itu nilai dU jika dilihat dari tabel *durbin watson* sebesar 1,7708 dan dL 1,3345. Maka hasilnya $1,7708 < 1,967 < 2,2292$ ($4 - 1,7708$). Sehingga bisa dikatakan data pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi dan layak untuk digunakan dalam uji regresi.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik Scatter Plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya

SRESID. Asumsi dalam penelitian ini yakni tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik – titik tidak membentuk pola serta menyebar diatas maupun dibawah angka nol.

Gambar 4. 1
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan grafik scatterplot. Dasar dalam pengambilan keputusan dalam penelitian ini jika titik diatas tersebar rata diatas dan dibawah angka 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Dari grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah titik tersebar rata diatas dan dibawah angka 0 serta pola sebarannya acak sehingga tidak membentuk pola tertentu. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak untuk digunakan dalam uji regresi.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat untuk menguji hipotesis. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized
		B	Std. Error	Coefficients
				Beta
1	(Constant)	,633	,140	
	Kepemilikan Institusional	,051	,088	,053
	Dewan Komisaris Independen	,044	,078	,000
	Kepemilikan Manajerial	,068	,090	,072
	Komite Audit	,024	,025	,083

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan dari penelitian ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 0,633 + 0,051X_1 + 0,044X_2 + 0,068X_3 + 0,024X_4 + e$$

Berikut ini penjelasan berdasarkan hasil persamaan tersebut:

1. Konstanta

Diperoleh nilai konstanta sebesar 0,633. Artinya apabila nilai dari variabel bebas dalam penelitian ini sama dengan nol maka nilai variabel terikat dalam penelitian ini sebesar 0,633.

2. Koefisien variabel X1 (Dewan Komisaris Independen)

Diperoleh nilai koefisien regresi b_1 sebesar 0,051. Artinya setiap kenaikan satu variabel dewan komisaris independen maka variabel *tax avoidance* meningkat sebesar 0,051 dengan asumsi variabel bebas lain tetap.

3. Koefisien variabel X2 (Kepemilikan Institusional)

Diperoleh nilai koefisien regresi b_2 sebesar 0,044. Artinya setiap kenaikan satu variabel kepemilikan institusional maka variabel *tax avoidance* meningkat sebesar 0,044 dengan asumsi variabel bebas lain tetap.

4. Koefisien variabel X3 (Kepemilikan Manajerial)

Diperoleh nilai koefisien regresi b_3 sebesar 0,068. Artinya setiap kenaikan satu variabel kepemilikan manajerial maka variabel *tax avoidance* meningkat sebesar 0,068 dengan asumsi variabel bebas lain tetap

5. Koefisien variabel X4 (Komite Audit)

Diperoleh nilai koefisien regresi b_4 sebesar 0,024. Artinya setiap kenaikan satu variabel komite audit maka variabel *tax avoidance* meningkat sebesar 0,024 dengan asumsi variabel bebas lain tetap

4.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas mengungkapkan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan nilai adjusted R square sebagai alat regresi. Jika ada penambahan satu variabel independen, maka nilai adjusted R square bisa naik maupun turun.

Tabel 4. 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,438 ^a	,419	,401	,20889	1,967

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Instiusional, Kepemilikan Manajemen

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,401 atau 40,1%. Sehingga *Tax avoidance* dapat dijelaskan sebesar 40,1% oleh variabel independen di dalam penelitian ini. Sementara untuk sisanya sebesar 59,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Pengukuran uji t menggunakan perbandingan antara t tabel dan t hitung yang menunjukkan angka probabilitas dengan tingkat signifikansi 0,05. Asumsi dalam penelitian ini yakni memiliki pengaruh jika $Sig < 0,05$ atau $T_{hitung} > T_{tabel}$

Tabel 4. 13
Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,633	,140		4,524	,000
Kepemilikan Instiusional	,051	,088	,053	2,573	,046

Dewan Komisaris Independen	,044	,078	,000	1,901	,020
Kepemilikan Manajerial	,068	,090	,072	2,759	,045
Komite Audit	,024	,025	,083	2,948	,003

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh nilai signifikansi untuk variabel dewan komisaris independen sebesar sebesar 0,020, yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu dengan nilai $t_{hitung} 1,901 > t_{tabel} 1,65622$.

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan institusional sebesar sebesar 0,046, yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu dengan nilai $t_{hitung} 2,573 > t_{tabel} 1,65622$.

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar sebesar 0,045 yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu dengan nilai $t_{hitung} 2,759 > t_{tabel} 1,65622$.

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh nilai signifikansi untuk variabel komite audit sebesar sebesar 0,003 yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu dengan nilai $t_{hitung} 2,948 > t_{tabel} 1,65622$.

4.3.4 Uji Simultan (Uji f)

Uji simultan digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas yang terdiri dari dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap variabel terikat yaitu *tax avoidance* secara bersamaan. Pengukuran uji f menggunakan perbandingan antara f tabel dan f hitung yang menunjukkan angka probabilitas dengan tingkat signifikansi 0,05. Asumsi dalam penelitian ini yakni memiliki pengaruh jika $\text{Sig} < 0,05$ atau $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$.

Tabel 4. 14
Hasil Uji Simultan

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,114	4	,029	8,654	,025 ^b
	Residual	5,890	135	,044		
	Total	6,005	139			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,025, yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu dengan nilai $F_{\text{hitung}} 8,654 > F_{\text{tabel}} 2,61$.

Berdasarkan output uji F dapat disimpulkan bahwa H5 diterima, artinya dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit secara simultan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.4 Pembahasan Hasil penelitian

4.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis pertama merumuskan dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil uji parsial yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen (X1) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y), serta jika dilihat dari nilai t_{hitung} yang bernilai positif menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jika presentase dewan komisaris independen tinggi maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan ini hipotesis pertama diterima, yang menyatakan “ Terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020”.

Hasil penelitian sama dengan yang dilakukan oleh Rohyana & Maryana (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian milik Sunarsih & Handayani (2016) yang memiliki hasil pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Tanda positif dapat diartikan ketika presentase dewan komisaris independen meningkat maka pengawasan terhadap kinerja direksi akan meningkat sehingga dapat menurunkan tindakan *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian milik Prasetyo & Pramuka (2018) serta penelitian milik Santoso & Muid (2014) menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena posisi dewan komisaris independen sebagai bagian dari luar manajemen perusahaan mewajibkan perusahaan untuk lebih mengungkapkan informasi keuangannya kepada para pemegang saham, sehingga manajemen perusahaan tidak bisa mempengaruhi komisaris independen.

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak ada hubungan afiliasi apapun dengan perusahaan efek. Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen dalam

sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan terhadap kinerja direksi perusahaan sehingga menurunkan tindakan *tax avoidance*.

4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis kedua merumuskan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil uji parsial (t) yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional (X2) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y), serta jika dilihat dari nilai t_{hitung} yang bernilai positif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jika jumlah kepemilikan institusional meningkat maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan institusional perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan ini hipotesis kedua diterima, yang menyatakan “ Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020”.

Hasil penelitian sama dengan yang dilakukan oleh Krisna (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam memastikan perusahaan tidak membuat keputusan yang dapat merugikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, pihak institusional kepada pihak manajemen perusahaan agar tidak melakukan kegiatan pajak agresif. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kendali dari pihak institusional yang kuat dapat mencegah perusahaan untuk menyalahgunakan kekuasaan dalam praktik penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian milik Sari (2014) serta Rejeki et al (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pihak institusional cenderung memberikan tekanan kepada pihak manajemen perusahaan untuk memaksimalkan perolehan laba bagi investor institusional.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yang memiliki peran untuk memonitoring manajemen perusahaan. Pihak institusional memiliki tanggung jawab terhadap publik untuk membantu melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan perusahaan dalam waktu jangka panjang di dalam melakukan penghindaran pajak.

4.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis ketiga merumuskan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil uji parsial (t) yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial (X3) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y), serta jika dilihat dari nilai t_{hitung} yang bernilai positif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jika jumlah kepemilikan manajerial meningkat maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan manajemen perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan ini hipotesis ketiga diterima, yang menyatakan “ Terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020”.

Hasil penelitian sama dengan yang dilakukan oleh Ashari et al. (2020) serta Sunarsih & Handayani (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam menghasilkan laba perusahaan pihak manajemen memiliki peranan penting, karena memiliki pengaruh yang tinggi dalam melakukan penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Krisna (2019) dan Prasetyo & Pramuka (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena adanya perilaku menguntungkan diri sendiri dari pihak manajer yang mengharuskan adanya imbalan dari tanggung jawab yang tinggi yang mereka dapatkan.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan mendorong pihak manajerial agar lebih berhati – hati dalam pengambilan

keputusan perusahaan. Karena mereka juga akan merasakan dampaknya secara langsung dari keputusan yang mereka buat berkaitan dengan *tax avoidance*.

4.4.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis keempat merumuskan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil uji parsial (t) yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa komite audit (X4) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y), serta jika dilihat dari nilai t_{hitung} yang bernilai positif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jika jumlah kepemilikan komite audit meningkat maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan ini hipotesis keempat diterima, yang menyatakan “ Terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020”.

Hasil penelitian sama dengan yang dilakukan oleh Nugraheni & Pratomo (2018) serta Triyanti et al (2020) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam rangka terciptanya kinerja operasional yang baik yang meliputi tata kelola perusahaan dan pembuatan laporan keuangan, komite audit memiliki peran melakukan pengawasan. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Dewi (2019) serta milik Pujilestari, R., & Winedar, M. (2019) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena keputusan terkait pengambilan kebijakan pajak perusahaan tidak dipengaruhi oleh komite audit dikarenakan masih belum efektif.

Komite audit merupakan sebuah komite yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan laporan keuangan serta pelaksanaan audit di dalam perusahaan. Komite audit memiliki peranan dalam menetapkan kebijakan beban pajak yang memiliki hubungan dengan aktifitas penghindaran pajak.

4.4.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis kelima merumuskan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil uji ANOVA yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* (Y). Dengan ini hipotesis kelima diterima, yang menyatakan “ Dewan komisaris independen (X1), kepemilikan institusional (X2), kepemilikan manajerial (X3) dan komite audit (X4) memiliki pengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020”.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Rohyana & Maryana (2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Penerapan *corporate governance* yang baik, akan berdampak baik pula bagi kegiatan operasional perusahaan. Sehingga secara simultan *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Dewi, 2019).

Hasil dari tabel koefisiensi determinansi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,401 atau 40,1%. Sehingga *Tax avoidance* dapat dijelaskan sebesar 40,1% oleh variabel independen yang terdiri dari dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit. Sementara untuk sisanya sebesar 59,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain seperti koneksi politik dan tingkat hutang perusahaan yang tidak dimasukkan di dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap *tax avoidance* dari perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda program spss versi 21. Terdapat 28 sampel perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020 yang dipilih menggunakan metode purposive sampling yang digunakan di dalam penelitian ini.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin besar presentase komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam melakukan *tax avoidance* juga semakin besar. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi luar, mendorong mereka untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen agar dapat menjamin investasi berkelanjutan mereka. Serta untuk mencapai keuntungan yang maksimal pihak institusional akan mendorong pihak manajemen untuk meminimalisir beban pajak melalui perencanaan pajak. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan membuat pihak manajemen perusahaan juga akan merasakan dampaknya langsung dari keputusan yang mereka buat. Sehingga mereka harus berhati – hati dalam mengoptimalkan laba perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian. Komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan komite audit merupakan komite yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan kinerja keuangan berperan di dalam penetapan kebijakan beban pajak perusahaan yang memiliki hubungan terhadap aktifitas *tax avoidance*. Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh terhadap

tax avoidance pada perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2016 – 2020.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian diatas, peneliti memiliki saran diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda, sehingga dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan dapat dijadikan sebagai pembanding antara penelitian sebelumnya.
2. Bagi perusahaan agar lebih berhati – hati dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan. Karena akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan kedepannya.
3. Bagi akademisi diharapkan jika akan melakukan penelitian yang sama dapat menambah variabel yang berbeda seperti koneksi politik dan tingkat hutang perusahaan sehingga hasil penelitian lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 14.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1 (8), 488–498.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*, 2 (2).
- Dewi, N. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016*. 9(1), 12.
- Emzaed, A. M., Syaikh, H., Soeradji, E., Norwili, Munib, & Fitria, E. (2018). Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam. *El-Maslahah Journal*, 8 (1).
- Ginting, S. (2016). *Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajaks Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating*. 6, 12.
- Ginting, Y. L. (2016). *Mekanisme Tata Kelola Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. 13, 10.
- Hapsari Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2020.
- Indonesia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/ POJK.04/ 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Jakarta

- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18, 82–91.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*. LPPM Universitas Siliwangi.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (n.d.). *Institutional Ownership, Managerial Ownership, And Audit Committee To Tax Avoidance (Study of Otomotif Companies Listed in Indonesian Stock Exchange 2010-2014)*. 8.
- Marfirah, D., & Bz, F. S. (2016). *Pengaruh Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015*. 1(2), 12.
- Moeljono. (2020). Faktor—Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5 (1), 103–121.
- Multi, S. S., & Limarjani, S. (2020). Faktor—Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada PERUSAHAAN Pertambangan Yang Go Public. *Festival Riset Akuntansi (FRA) II 2020; Webinar Dan Call for Paper Online*.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). *The Influence Of Audit Committee, Audit Quality, And Company Size On Tax Avoidance (Study On Manufacturing Companies Of Automotive Subsectors Listed On Indonesian Stock Exchange Year 2012-2016)*. 8.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance*. 20, 15.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak*. 8.
- Pujilestari, R., & Winedar, M. (2019). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance*. 15 (2).
- Rejeki, S., Wijaya, A. L., & Amah, N (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2017). *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*

- Rohyana, C., & Maryana, D. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada 7 Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8 (2), 117–121.
- Santoso, S. (2009). *Mastering SPSS Versi 17*. PT. Elex Media Komputindo.
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 148–159.
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12.
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal WRS*, 2, 491–512.
- Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*, 1 (1), 63–86.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2016). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 163–185, 163–185.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113.
- Wijayanti, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13, 181–192.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1), 1–11.

Zahirah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015). 4, 3543–3556.

<https://www.idx.co.id/> Diakses pada tanggal 1 April 2022

www.idnfinancials.com/id/ Diakses pada tanggal 2 April 2022

Lampiran 1: Hasil Perhitungan Cash Effective Rates

NO	Kode Perusahaan	CETR		
		2016		
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	BAYU	9.724.574.457	35.311.445.269	0,275
2	BHIT	603.037	1.598.840	0,377
3	BMTR	587.602	1.412.175	0,416
4	BNBR	137.936	3.590.368	0,038
5	HOTL	325.279.441	12.441.176.083	0,026
6	MIKA	194.517.006.169	723.432.188.446	0,269
7	SRTG	16.219	6.585.135	0,002
8	ICON	8.387.651.053	6.898.976.134	1,216
9	KPIG	63.244.611.254	1.789.653.768.260	0,035
10	PANR	7.374.704	19.551.202	0,377
11	MTDL	183.779	429.356	0,428
12	JTPE	23.016.226.171	98.552.704.713	0,234
13	MDIA	76.818.063	77.787.304	0,988
1	RANC	2.305.956.096	49.707.851.202	0,046
15	RALS	34.894	465.065	0,075
16	MIDI	55.833	254.376	0,219
17	ERAA	26.231.384.847	383.536.614.051	0,068
18	CSAP	55.415.246	100.896.941	0,549
19	AKRA	378.653.454	1.118.546.845	0,339
20	APII	7.159.975.603	22.605.142.434	0,317
21	CLPI	23.680.721.033	85.199.962.015	0,278
22	INTD	678.237.500	1.854.980.256	0,366
23	JKON	72.697.136.902	402.068.042.408	0,181
24	LTLS	91.769	141.243	0,650
25	MPMX	240.663	622.849	0,386
26	MICE	11.233.336.695	44.441.102.324	0,253
27	TGKA	72.155.469.962	247.273.473.816	0,292
28	UNTR	2.028.487	6.730.030	0,301

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	CETR		
		2017		
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	BAYU	8.011.871.658	43.930.067.198	0,182
2	BHIT	785.532	1.205.454	0,652
3	BMTR	690.791	2.026.069	0,341
4	BNBR	69.323	857.445	0,081
5	HOTL	25.982.344.898	12.780.924.934	2,033
6	MIKA	207.880.037.726	716.019.220.504	0,290

7	SRTG	89.734	3.187.469	0,028
8	ICON	5.098.032.255	17.107.599.605	0,298
9	KPIG	43.639.183.702	1.309.961.662.112	0,033
10	PANR	22.643.296	60.912.276	0,372
11	MTDL	140.535	468.483	0,300
12	JTPE	28.081.674.291	110.555.734.896	0,254
13	MDIA	52.088.961	640.502.627	0,081
1	RANC	14.543.924.321	47.109.826.388	0,309
15	RALS	89.588	466.592	0,192
16	MIDI	60.176	129.235	0,466
17	ERAA	22.922.663.508	479.656.198.588	0,048
18	CSAP	66.717.242	115.130.429	0,579
19	AKRA	943.192.500	1.126.408.644	0,837
20	APII	8.019.790.683	19.161.807.863	0,419
21	CLPI	28.560.297.163	51.539.411.028	0,554
22	INTD	914.914.750	2.622.348.041	0,349
23	JKON	-	354.886.780	0,000
24	LTLS	58.350	251.788	0,232
25	MPMX	136.735	481.875	0,284
26	MICE	11.119.546.142	101.431.580.514	0,110
27	TGKA	81.329.707.775	325.696.478.507	0,250
28	UNTR	2.033.517	10.522.657	0,193

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	CETR		
		2018		
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	BAYU	11.123.724.533	51.377.887.450	0,217
2	BHIT	777.639	1.522.284	0,511
3	BMTR	699.843	1.782.744	0,393
4	BNBR	67.829	1.210.685	0,056
5	HOTL	-	111.888.905	0,000
6	MIKA	189.990.351.047	653.725.493.289	0,291
7	SRTG	164.501	6.685.056	0,025
8	ICON	5.098.032.255	17.107.599.605	0,298
9	KPIG	38.957.291.048	696.180.093.193	0,056
10	PANR	33.640.744	18.812.759	1,788
11	MTDL	160.559	579.270	0,277
12	JTPE	38.986.052.141	160.136.680.625	0,243
13	MDIA	79.629.544	110.740.655	0,719
14	RANC	12.778.039.832	59.877.255.323	0,213
15	RALS	73.151	717.172	0,102
16	MIDI	42.322	207.694	0,204
17	ERAA	567.445.788	1.203.140.844	0,472

18	CSAP	94.799.398	131.939.083	0,719
19	AKRA	1.201.541.054	868.080.622	1,384
20	APII	6.370.347.975	40.586.253.153	0,157
21	CLPI	24.291.562.154	32.364.663.354	0,751
22	INTD	1.559.981.332	2.755.865.468	0,566
23	JKON	64.490.583	320.148.629	0,201
24	LTLS	33.202	305.450	0,109
25	MPMX	639.583	225.502	2,836
26	MICE	38.340.080.812	44.127.315.887	0,869
27	TGKA	91.068.365.693	426.291.444.535	0,214
28	UNTR	3.877.972	15.708.719	0,247

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	CETR		
		2019		
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	BAYU	5.199.042.757	59.645.271.222	0,087
2	BHIT	698.491	2.713.548	0,257
3	BMTR	1.576.989	2.907.632	0,542
4	BNBR	187.893	881.524	0,213
5	HOTL	3.401.935.891	3.886.393.163	0,875
6	MIKA	217.731.021.690	609.966.222.333	0,357
7	SRTG	73.536	7.344.118	0,010
8	ICON	3.026.001.363	41.729.110.241	0,073
9	KPIG	61.398.365.965	284.351.496.969	0,216
10	PANR	24.089.971	17.524.926	1,375
11	MTDL	215.811	716.958	0,301
12	JTPE	35.832.554.402	242.552.261.337	0,148
13	MDIA	34.971.165	104.650.861	0,334
14	RANC	8.333.866.195	94.284.369.099	0,088
15	RALS	173.011	733.161	0,236
16	MIDI	39.617	278.023	0,142
17	ERAA	216.810.666	472.719.996	0,459
18	CSAP	146.370.722	105.046.392	1,393
19	AKRA	1.132.647.919	865.379.704	1,309
20	APII	13.502.335.577	34.186.846.636	0,395
21	CLPI	15.129.615.660	55.527.213.822	0,272
22	INTD	1.792.869.635	2.119.215.744	0,846
23	JKON	75.539.765	258.217.922	0,293
24	LTLS	1.834	302.147	0,006
25	MPMX	859.074	685.809	1,253
26	MICE	13.121.925.305	45.193.682.645	0,290

27	TGKA	122.370.262.617	553.046.935.019	0,221
28	UNTR	6.842.083	15.476.885	0,442

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	CETR		
		2020		
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	BAYU	5.461.775.061	4.378.836.798	1,247
2	BHIT	1.760.537	2.187.197	0,805
3	BMTR	1.386.923	2.224.285	0,624
4	BNBR	79.663	927.306	0,086
5	HOTL	289.054.716	2.309.033.409	0,125
6	MIKA	148.546.187.838	528.153.796.371	0,281
7	SRTG	29.445	8.693.225	0,003
8	ICON	3.644.963.983	8.096.796.384	0,450
9	KPIG	26.437.118.423	259.797.684.137	0,102
10	PANR	9.873.783	234.224.003	0,042
11	MTDL	135.660	7.033.307	0,019
12	JTPE	44.893.905.545	97.672.912.335	0,460
13	MDIA	47.146.413	129.067.548	0,365
14	RANC	8.333.866.195	94.284.369.099	0,088
15	RALS	18.947	181.445	0,104
16	MIDI	58.410	268.015	0,218
17	ERAA	292.034.097	917.316.742	0,318
18	CSAP	92.883.159	114.757.297	0,809
19	AKRA	672.041.964	1.191.716.906	0,564
20	APII	20.555.299.403	38.984.987.175	0,527
21	CLPI	15.799.159.901	51.893.851.190	0,304
22	INTD	1.046.573.283	3.275.351.276	0,320
23	JKON	63.792.951	89.830.345	0,710
24	LTLS	69.239	196.332	0,353
25	MPMX	119.361	283.464	0,421
26	MICE	4.935.544.307	8.674.034.193	0,569
27	TGKA	101.949.304.470	625.284.763.496	0,163
28	UNTR	3.347.588	7.011.186	0,477

Sumber: diolah peneliti, 2022

Lampiran 1 (Lanjutan): Hasil Perhitungan Cash Effective Rate

PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)

	2016	2015 *)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	12.526.818	11.389.578	Receipts from customers
Pembayaran untuk pemasok	(9.160.933)	(5.583.896)	Cash paid for suppliers
Pembayaran untuk karyawan	(1.781.425)	(1.549.605)	Cash paid for employees
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi entitas lembaga keuangan bank	1.584.460	4.256.077	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities of bank financial institutions entity
Penurunan (kenaikan) aset operasi entitas lembaga keuangan bank			Decrease (increase) in operating assets of bank financial institutions entity
Efek-efek	180.963	(97.400)	Securities
Kredit	(863.294)	(937.014)	Loans
Aset lain-lain	(165.742)	43.356	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi			Increase (decrease) in operating liabilities
Simpanan dan simpanan dari bank lain	397.587	2.489.617	Deposits and deposits from other banks
Liabilitas lain-lain	247.385	(76.142)	Other Liabilities
Kas Diperoleh dari Operasi	1.381.359	5.678.494	Cash Generated from Operations
Pembayaran pajak	(603.037)	(807.879)	Payments of taxes
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(1.120.787)	(1.117.717)	Payments of interest and finance cost
Pembayaran royalti ke pemerintah	(15.289)	(19.312)	Royalty paid to Government
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(357.754)	3.733.586	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan (penempatan) aset keuangan lancar lainnya - bersih	(950.930)	250.746	Redemptions (placement) in other current financial assets - net
Penempatan aset keuangan lainnya - tidak lancar - bersih	645.509	(759.994)	Placement of other non-current financial assets - net
Penerimaan bunga	24.833	43.794	Interest received
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	16.351	26.737	Dividends received from associate
Hasil penjualan aset tetap	87.664	84.318	Proceeds from sale of property and equipment
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	(18.033)	(73.199)	Additions to investment in associates
Pembelian aset tetap	(1.615.143)	(3.067.533)	Acquisitions of property and equipment
Penambahan aset al-ijarah	(1.292)	(19.788)	Additions of al-ijarah assets
Penurunan (penambahan) aset lain dan uang muka Kas dan setara kas yang diperoleh dari akuisisi entitas anak setelah dikurangi biaya perolehan	(168.265)	87.804	Deduction (addition) to other assets and advances Cash and cash equivalent received from acquisition of subsidiaries net of acquisition cost
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.975.118)	(3.419.872)	Net Cash Used in Investing Activities

PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2016	2015 *)	
PENDAPATAN BERSIH	36			NET REVENUES
Media		10.293.350	10.406.983	Media
Lembaga keuangan		2.015.030	1.889.256	Financial institutions
Lainnya		586.145	581.952	Others
Jumlah pendapatan bersih		12.894.525	12.878.191	Total net revenues
BEBAN LANGSUNG	37	(7.763.595)	(8.222.929)	DIRECT COSTS
LABA KOTOR		5.130.930	4.655.262	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	38	(2.986.021)	(2.616.216)	General and administration expense
Beban keuangan	39	(1.120.787)	(979.122)	Finance cost
Bagian laba bersih entitas asosiasi		671.564	68.105	Equity in net income of associates
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	52	370.466	(1.407.157)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan bunga		32.372	62.689	Interest income
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	40	(499.684)	(210.676)	Other gain and losses - net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		1.598.840	(427.115)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK - BERSIH	41	(750.897)	(143.208)	TAX EXPENSES - NET
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		847.943	(570.323)	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR

Lampiran 2: Hasil Perhitungan Dewan Komisaris Independen

NO	Kode Perusahaan	Dewan Komisaris Independen (DKI)		
		2016		
		Dewan Komisaris	Komisaris Independen	DKI
1	BAYU	3,00	1	0,333
2	BHIT	5,00	2	0,400
3	BMTR	5,00	3	0,600
4	BNBR	3,00	1	0,333
5	HOTL	2,00	1	0,500
6	MIKA	5,00	2	0,400
7	SRTG	5,00	2	0,400
8	ICON	3,00	1	0,333
9	KPIG	5,00	2	0,400
10	PANR	5,00	2	0,400
11	MTDL	2,00	1	0,500
12	JTPE	1,00	1	1,000
13	MDIA	2,00	1	0,500
14	RANC	2,00	1	0,500
15	RALS	3,00	2	0,667
16	MIDI	3,00	3	1,000
17	ERAA	2,00	1	0,500
18	CSAP	3,00	2	0,667
19	AKRA	2,00	1	0,500
20	APII	2,00	1	0,500
21	CLPI	2,00	1	0,500
22	INTD	2,00	1	0,500
23	JKON	3,00	2	0,667
24	LTLS	3,00	3	1,000
25	MPMX	4,00	2	0,500
26	MICE	2,00	1	0,500
27	TGKA	3,00	1	0,333
28	UNTR	4,00	2	0,500

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Dewan Komisaris Independen (DKI)		
		2017		
		Dewan Komisaris	Komisaris Independen	DKI
1	BAYU	3,00	1	0,333
2	BHIT	6,00	2	0,333
3	BMTR	4,00	3	0,750
4	BNBR	3,00	1	0,333

5	HOTL	2,00	1	0,500
6	MIKA	5,00	2	0,400
7	SRTG	5,00	2	0,400
8	ICON	3,00	1	0,333
9	KPIG	5,00	2	0,400
10	PANR	5,00	2	0,400
11	MTDL	2,00	1	0,500
12	JTPE	1,00	1	1,000
13	MDIA	3,00	2	0,667
14	RANC	2,00	1	0,500
15	RALS	3,00	2	0,667
16	MIDI	2,00	1	0,500
17	ERAA	2,00	1	0,500
18	CSAP	4,00	2	0,500
19	AKRA	2,00	1	0,500
20	APII	2,00	1	0,500
21	CLPI	2,00	1	0,500
22	INTD	2,00	1	0,500
23	JKON	3,00	2	0,667
24	LTLS	3,00	3	1,000
25	MPMX	4,00	2	0,500
26	MICE	2,00	1	0,500
27	TGKA	3,00	1	0,333
28	UNTR	3,00	3	1,000

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Dewan Komisaris Independen (DKI)		
		2018		
		Dewan Komisaris	Komisaris Independen	DKI
1	BAYU	3,00	1	0,333
2	BHIT	6,00	2	0,333
3	BMTR	4,00	3	0,750
4	BNBR	3,00	1	0,333
5	HOTL	2,00	1	0,500
6	MIKA	3,00	2	0,667
7	SRTG	5,00	2	0,400
8	ICON	3,00	1	0,333
9	KPIG	5,00	2	0,400
10	PANR	5,00	2	0,400
11	MTDL	2,00	1	0,500
12	JTPE	1,00	1	1,000
13	MDIA	3,00	1	0,333
14	RANC	2,00	1	0,500

15	RALS	3,00	2	0,667
16	MIDI	1,00	1	1,000
17	ERAA	2,00	1	0,500
18	CSAP	4,00	2	0,500
19	AKRA	2,00	1	0,500
20	APII	2,00	1	0,500
21	CLPI	2,00	1	0,500
22	INTD	2,00	1	0,500
23	JKON	2,00	1	0,500
24	LTLS	3,00	3	1,000
25	MPMX	4,00	2	0,500
26	MICE	2,00	1	0,500
27	TGKA	3,00	1	0,333
28	UNTR	4,00	2	0,500

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Dewan Komisaris Independen (DKI)		
		2019		
		Dewan Komisaris	Komisaris Independen	DKI
1	BAYU	3,00	1	0,333
2	BHIT	6,00	2	0,333
3	BMTR	4,00	3	0,750
4	BNBR	4,00	2	0,500
5	HOTL	2,00	1	0,500
6	MIKA	3,00	2	0,667
7	SRTG	5,00	2	0,400
8	ICON	3,00	1	0,333
9	KPIG	5,00	2	0,400
10	PANR	5,00	2	0,400
11	MTDL	2,00	1	0,500
12	JTPE	2,00	1	0,500
13	MDIA	3,00	2	0,667
14	RANC	2,00	1	0,500
15	RALS	4,00	2	0,500
16	MIDI	1,00	1	1,000
17	ERAA	2,00	2	1,000
18	CSAP	4,00	2	0,500
19	AKRA	2,00	1	0,500
20	APII	2,00	1	0,500
21	CLPI	2,00	1	0,500
22	INTD	1,00	1	1,000
23	JKON	3,00	2	0,667
24	LTLS	3,00	3	1,000

25	MPMX	4,00	2	0,500
26	MICE	2,00	1	0,500
27	TGKA	3,00	3	1,000
28	UNTR	4,00	2	0,500

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Dewan Komisaris Independen (DKI)		
		2020		
		Dewan Komisaris	Komisaris Independen	DKI
1	BAYU	3,00	1	0,333
2	BHIT	5,00	2	0,400
3	BMTR	4,00	3	0,750
4	BNBR	3,00	1	0,333
5	HOTL	2,00	1	0,500
6	MIKA	3,00	2	0,667
7	SRTG	5,00	2	0,400
8	ICON	2,00	1	0,500
9	KPIG	4,00	2	0,500
10	PANR	3,00	1	0,333
11	MTDL	2,00	1	0,500
12	JTPE	2,00	1	0,500
13	MDIA	1,00	2	2,000
14	RANC	2,00	1	0,500
15	RALS	4,00	2	0,500
16	MIDI	1,00	1	1,000
17	ERAA	2,00	1	0,500
18	CSAP	3,00	2	0,667
19	AKRA	2,00	1	0,500
20	APII	2,00	1	0,500
21	CLPI	2,00	1	0,500
22	INTD	1,00	1	1,000
23	JKON	2,00	1	0,500
24	LTLS	3,00	2	0,667
25	MPMX	3,00	2	0,667
26	MICE	2,00	1	0,500
27	TGKA	3,00	1	0,333
28	UNTR	4,00	2	0,500

Sumber: diolah peneliti, 2022

Lampiran 2 (Lanjutan): Hasil Perhitungan Dewan Komisaris Independen

d. Susunan Pengurus dan Informasi Lain

Susunan pengurus Perusahaan, komite audit, sekretaris Perusahaan dan unit audit internal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/December 31, 2015</u>	
<u>Komisaris</u>			<u>Commissioners</u>
Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo	Hary Djaja	: President Commissioner
Komisaris	: Liliana Tanoesoedibjo Angela Herliani Tanoesoedibjo	Ratna Endang Soelistyawati Bambang Rudjanto Tanoesoedibjo Liliana Tanoesoedibjo	: Commissioners
Komisaris Independen	: Kardinal Alamsyah Karim Darpito Pudyastungkoro	Kardinal Alamsyah Karim Darpito Pudyastungkoro	: Independent Commissioners
<u>Direksi</u>			<u>Directors</u>
Direktur Utama	: Darna Putra Wati	Hary Tanoesoedibjo	: President Director
Wakil Direktur Utama	: -	Darna Putra Wati	: Vice President Director
Wakil Direktur Utama dan Direktur Independen	: Susanty Tjandra Sanusi	Susanty Tjandra Sanusi	: Independent Director
Direktur	: Tien Natalia Purnama Johan Sebastian Henry Suparman	Tien Natalia Purnama Johan Sebastian Henry Suparman	: Directors
<u>Komite Audit</u>			<u>Audit Committee</u>
Ketua	: Kardinal Alamsyah Karim	Kardinal Alamsyah Karim	: Chairman
Anggota	: Darpito Pudyastungkoro Fransiska Therik	Darpito Pudyastungkoro Sonny Widjaja	: Members
Sekretaris Perusahaan Audit Internal	: Santi Paramita Emy	Santi Paramita Emy	: Corporate Secretary : Internal Audit

d. Management and Other Information

At December 31, 2016 and 2015, the Company's management, audit committee, corporate secretary, and internal audit consists of the following:

d. Susunan Pengurus dan Informasi Lain

Susunan pengurus Perusahaan, komite audit, sekretaris Perusahaan dan unit audit internal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/December 31, 2015</u>	
<u>Komisaris</u>			<u>Commissioners</u>
Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo	Hary Djaja	: President Commissioner
Komisaris	: Liliana Tanoesoedibjo Angela Herliani Tanoesoedibjo	Ratna Endang Soelistyawati Bambang Rudjanto Tanoesoedibjo Liliana Tanoesoedibjo	: Commissioners
<u>Komisaris Independen</u>	: Kardinal Alamsyah Karim Darpito Pudyastungkoro	Kardinal Alamsyah Karim Darpito Pudyastungkoro	: Independent Commissioners
<u>Direksi</u>			<u>Directors</u>
Direktur Utama	: Darna Putra Wati	Hary Tanoesoedibjo	: President Director
Wakil Direktur Utama	: -	Darna Putra Wati	: Vice President Director
Wakil Direktur Utama dan Direktur Independen	: Susanty Tjandra Sanusi	Susanty Tjandra Sanusi	: Independent Director
Direktur	: Tien Natalia Purnama Johan Sebastian Henry Suparman	Tien Natalia Purnama Johan Sebastian Henry Suparman	: Directors
<u>Komite Audit</u>			<u>Audit Committee</u>
Ketua	: Kardinal Alamsyah Karim	Kardinal Alamsyah Karim	: Chairman
Anggota	: Darpito Pudyastungkoro Fransiska Therik	Darpito Pudyastungkoro Sonny Widjaja	: Members
Sekretaris Perusahaan Audit Internal	: Santi Paramita Emy	Santi Paramita Emy	: Corporate Secretary : Internal Audit

d. Management and Other Information

At December 31, 2016 and 2015, the Company's management, audit committee, corporate secretary, and internal audit consists of the following:

Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional

NO	Kode Perusahaan	Kepemilikan Institusional		
		2016		
		Kepemilikan Institusional (modal saham institusi)	Saham Beredar (total saham)	INST
1	BAYU	262.442.807	353.220.780	0,743
2	BHIT	26.715.438.250	48.057.050.367	0,556
3	BMTR	7.502.642.500	14.198.621.422	0,528
4	BNBR	44.205.149.898	97.021.717.528	0,456
5	HOTL	2.910.000.000	3.550.000.250	0,820
6	MIKA	8.730.454.200	14.550.736.000	0,600
7	SRTG	858.919.290	2.712.967.000	0,317
8	ICON	346.189.000	1.089.750.000	0,318
9	KPIG	3.359.028.758	6.891.067.237	0,487
10	PANR	950.964.423	1.200.000.000	0,792
11	MTDL	600.731.930	2.376.172.964	0,253
12	JTPE	1.125.000.000	1.713.012.500	0,657
13	MDIA	3.741.464.040	39.215.538.400	0,095
14	RANC	1.160.714.000	1.564.487.500	0,742
15	RALS	4.361.740.800	7.096.000.000	0,615
16	MIDI	2.499.552.500	2.882.353.000	0,867
17	ERAA	1.738.996.040	2.900.000.000	0,600
18	CSAP	2.870.459.424	4.053.052.920	0,708
19	AKRA	2.338.456.120	3.991.781.170	0,586
20	APII	177.785.240	1.075.760.000	0,165
21	CLPI	202.285.300	306.338.500	0,660
22	INTD	68.188.000	118.365.600	0,576
23	JKON	9.929.587.750	16.308.519.860	0,609
24	LTLS	843.232.000	1.560.000.000	0,541
25	MPMX	3.157.336.929	4.462.963.276	0,707
26	MICE	268.833.618	600.000.000	0,448
27	TGKA	908.993.570	918.492.750	0,990
28	UNTR	2.219.317.358	3.730.135.136	0,595

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Kepemilikan Institusional		
		2017		
		Kepemilikan Institusional (modal saham institusi)	Saham Beredar (total saham)	INST
1	BAYU	262.442.807	353.220.780	0,633
2	BHIT	26.715.438.250	48.057.050.367	0,566

3	BMTR	7.502.642.500	14.198.621.422	0,529
4	BNBR	44.205.149.898	97.021.717.528	0,521
5	HOTL	2.910.000.000	3.550.000.250	0,820
6	MIKA	8.730.454.200	14.550.736.000	0,600
7	SRTG	858.919.290	2.712.967.000	0,326
8	ICON	346.189.000	1.089.750.000	0,370
9	KPIG	3.359.028.758	6.891.067.237	0,458
10	PANR	950.964.423	1.200.000.000	0,792
11	MTDL	600.731.930	2.376.172.964	0,358
12	JTPE	1.125.000.000	1.713.012.500	0,657
13	MDIA	3.741.464.040	39.215.538.400	0,095
14	RANC	1.160.714.000	1.564.487.500	0,750
15	RALS	4.361.740.800	7.096.000.000	0,620
16	MIDI	2.499.552.500	2.882.353.000	0,867
17	ERAA	1.738.996.040	2.900.000.000	0,600
18	CSAP	2.870.459.424	4.053.052.920	0,708
19	AKRA	2.338.456.120	3.991.781.170	0,585
20	APII	177.785.240	1.075.760.000	0,719
21	CLPI	202.285.300	306.338.500	0,584
22	INTD	68.188.000	118.365.600	0,576
23	JKON	9.929.587.750	16.308.519.860	0,609
24	LTLS	843.232.000	1.560.000.000	0,534
25	MPMX	3.157.336.929	4.462.963.276	0,707
26	MICE	268.833.618	600.000.000	0,448
27	TGKA	908.993.570	918.492.750	0,982
28	UNTR	2.219.317.358	3.730.135.136	0,595

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Kepemilikan Instiusional		
		2018		
		Kepemilikan Instiusional (modal saham institusi)	Saham Beredar (total saham)	INST
1	BAYU	223.002.841	353.220.780	0,631
2	BHIT	31.351.391.924	51.939.135.584	0,604
3	BMTR	7.506.327.500	14.198.621.422	0,529
4	BNBR	36.610.877.995	20.771.977.000	1,763
5	HOTL	2.910.000.000	3.550.001.452	0,820
6	MIKA	8.812.954.200	14.550.736.000	0,606
7	SRTG	859.500.000	2.712.967.000	0,317
8	ICON	403.060.066	1.089.750.000	0,370
9	KPIG	32.053.407.320	74.079.122.790	0,433
10	PANR	770.964.423	1.200.000.000	0,642
11	MTDL	879.833.778	2.455.376.917	0,358

12	JTPE	1.125.000.000	1.713.012.500	0,657
13	MDIA	35.293.863.400	39.215.538.400	0,900
14	RANC	1.174.027.170	1.564.487.500	0,750
15	RALS	3.965.000.000	7.096.000.000	0,559
16	MIDI	2.499.552.500	2.882.353.000	0,867
17	ERAA	1.738.996.040	3.190.000.000	0,545
18	CSAP	2.438.949.124	4.458.352.920	0,547
19	AKRA	2.349.056.120	4.014.694.920	0,585
20	APII	773.340.020	1.075.760.000	0,719
21	CLPI	178.985.300	306.338.500	0,584
22	INTD	340.940.000	591.828.000	0,576
23	JKON	9.929.587.750	16.308.519.860	0,609
24	LTLS	833.632.000	1.560.000.000	0,534
25	MPMX	3.157.336.929	4.462.963.276	0,707
26	MICE	268.833.618	600.000.000	0,448
27	TGKA	899.254.500	918.492.750	0,979
28	UNTR	2.219.317.358	3.730.135.136	0,595

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Kepemilikan Institusional		
		2019		
		Kepemilikan Institusional (modal saham institusi)	Saham Beredar (total saham)	INST
1	BAYU	238.470.456	353.220.780	0,675
2	BHIT	34.328.505.828	67.767.400.934	0,507
3	BMTR	7.480.817.500	15.334.511.286	0,488
4	BNBR	32.733.219.019	20.863.053.480	1,569
5	HOTL	2.910.000.000	3.550.001.452	0,820
6	MIKA	8.812.954.200	14.246.349.500	0,619
7	SRTG	887.722.000	2.712.967.000	0,327
8	ICON	346.189.000	1.089.750.000	0,318
9	KPIG	27.745.125.080	80.625.726.664	0,344
10	PANR	770.964.423	1.200.000.000	0,642
11	MTDL	1.027.715.886	2.455.376.917	0,419
12	JTPE	1.125.000.000	1.713.012.500	0,657
13	MDIA	35.293.863.400	39.215.538.400	0,900
14	RANC	1.159.250.270	1.564.487.500	0,741
15	RALS	3.965.000.000	7.096.000.000	0,559
16	MIDI	2.499.552.500	2.882.353.000	0,867
17	ERAA	1.738.996.040	3.190.000.000	0,545
18	CSAP	3.795.613.624	4.458.352.920	0,851
19	AKRA	2.369.056.120	4.014.694.920	0,590

20	APII	773.340.020	1.075.760.000	0,719
21	CLPI	178.985.300	306.338.500	0,584
22	INTD	323.940.000	591.828.000	0,547
23	JKON	9.929.587.750	16.308.519.860	0,609
24	LTLS	833.632.000	1.560.000.000	0,534
25	MPMX	3.317.663.035	4.462.963.276	0,743
26	MICE	268.833.618	600.000.000	0,448
27	TGKA	899.254.500	918.492.750	0,979
28	UNTR	2.219.317.358	3.730.135.136	0,595

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Kepemilikan Institusional		
		2020		
		Kepemilikan Institusional (modal saham institusi)	Kepemilikan Institusional (modal saham institusi)	INST
1	BAYU	238.470.456	353.220.780	0,675
2	BHIT	34.253.433.228	73.766.098.834	0,464
3	BMTR	7.480.817.500	16.583.997.586	0,451
4	BNBR	11.358.775.761	20.863.053.480	0,544
5	HOTL	1.971.753.200	3.550.001.452	0,555
6	MIKA	8.812.954.200	14.246.349.500	0,619
7	SRTG	887.722.000	2.712.967.000	0,327
8	ICON	439.422.000	1.089.750.000	0,403
9	KPIG	38.260.136.534	80.625.726.664	0,475
10	PANR	770.964.423	1.200.000.000	0,642
11	MTDL	1028408786	2.455.376.917	0,419
12	JTPE	1.125.000.000	1.713.012.500	0,657
13	MDIA	35.293.863.400	39.215.538.400	0,900
14	RANC	1.159.250.270	1.564.487.500	0,741
15	RALS	3.965.000.000	7.096.000.000	0,559
16	MIDI	299.552.500	2.882.353.000	0,104
17	ERAA	1.738.996.040	3.190.000.000	0,545
18	CSAP	3.831.958.224	4.458.352.920	0,860
19	AKRA	2.392.626.120	4.014.694.920	0,596
20	APII	773.340.020	1.075.760.000	0,719
21	CLPI	178.985.300	306.338.500	0,584
22	INTD	323.940.000	591.828.000	0,547
23	JKON	9.929.587.750	16.308.519.860	0,609
24	LTLS	853.432.000	1.560.000.000	0,547
25	MPMX	2.781.901.488	4.462.963.276	0,623
26	MICE	268.833.618	600.000.000	0,448
27	TGKA	899.233.800	918.492.750	0,979
28	UNTR	2.219.317.358	3.730.135.136	0,595

Sumber: diolah peneliti, 2022

Lampiran 3 (Lanjutan) : Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional

PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN -TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan

PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued

29. MODAL SAHAM

Seusai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan, PT BSR Indonesia pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

29. CAPITAL STOCK

Based on stockholders list issued by Administration Office of Listed Shares of the Company PT BSR Indonesia the stockholders of the Company as follows:

Pemegang saham	31 Desember/December 31, 2016		Jumlah/ Total	Name of stockholder
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %		
HT Investment Development Ltd	13.199.078.138	27,88	1.319.908	HT Investment Development Ltd
UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd	8.402.553.000	17,75	840.255	UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd
PT Bhakti Panjiwira	5.113.807.112	10,80	511.381	PT Bhakti Panjiwira
Hary Tanoesoedibjo, MBA Komisaris dan direksi	2.158.525.300	4,56	215.853	Hary Tanoesoedibjo, MBA Commissioners and directors
Liliana Tanaja (Komisaris)	90.762.000	0,19	9.076	Liliana Tanaja (Commissioner)
Angela Herliani Tanoesoedibjo (Komisaris)	52.360.300	0,11	5.236	Angela Herliani Tanoesoedibjo (Commissioner)
Darma Putra (Wakil Direktur Utama)	29.359.100	0,06	2.936	Darma Putra (Vice President Director)
Tien (Direktur)	26.886.800	0,06	2.689	Tien (Director)
Henry Suparman (Direktur)	16.180.500	0,03	1.618	Henry Suparman (Director)
Natalia Purnama (Direktur)	7.457.000	0,02	746	Natalia Purnama (Director)
Johan Sebastian (Direktur)	1.000.000	0,00	100	Johan Sebastian (Director)
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	18.248.694.871	38,54	1.824.868	Public (each ownership below 5%)
Jumlah	47.346.664.121	100,00	4.734.666	Total
Ditambah: Saham diperoleh kembali (Catatan 34)	710.386.246		71.039	Add: Treasury stocks (Note 34)
Jumlah	48.057.050.367		4.805.705	Total

PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN -TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan

PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued

29. MODAL SAHAM

Seusai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan, PT BSR Indonesia pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

29. CAPITAL STOCK

Based on stockholders list issued by Administration Office of Listed Shares of the Company PT BSR Indonesia the stockholders of the Company as follows:

Pemegang saham	31 Desember/December 31, 2016		Jumlah/ Total	Name of stockholder
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %		
HT Investment Development Ltd	13.199.078.138	27,88	1.319.908	HT Investment Development Ltd
UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd	8.402.553.000	17,75	840.255	UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd
PT Bhakti Panjiwira	5.113.807.112	10,80	511.381	PT Bhakti Panjiwira
Hary Tanoesoedibjo, MBA Komisaris dan direksi	2.158.525.300	4,56	215.853	Hary Tanoesoedibjo, MBA Commissioners and directors
Liliana Tanaja (Komisaris)	90.762.000	0,19	9.076	Liliana Tanaja (Commissioner)
Angela Herliani Tanoesoedibjo (Komisaris)	52.360.300	0,11	5.236	Angela Herliani Tanoesoedibjo (Commissioner)
Darma Putra (Wakil Direktur Utama)	29.359.100	0,06	2.936	Darma Putra (Vice President Director)
Tien (Direktur)	26.886.800	0,06	2.689	Tien (Director)
Henry Suparman (Direktur)	16.180.500	0,03	1.618	Henry Suparman (Director)
Natalia Purnama (Direktur)	7.457.000	0,02	746	Natalia Purnama (Director)
Johan Sebastian (Direktur)	1.000.000	0,00	100	Johan Sebastian (Director)
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	18.248.694.871	38,54	1.824.868	Public (each ownership below 5%)
Jumlah	47.346.664.121	100,00	4.734.666	Total
Ditambah: Saham diperoleh kembali (Catatan 34)	710.386.246		71.039	Add: Treasury stocks (Note 34)
Jumlah	48.057.050.367		4.805.705	Total

Lampiran 4 : Hasil Perhitungan Kepemilikan Manajerial

NO	Kode Perusahaan	Kepemilikan Manajerial		
		2016		
		Kepemilikan Manajerial	Jumlah Saham Beredar	Manajerial
1	BAYU	30.609.000	353.220.780	0,087
2	BHIT	2.450.531.000	48.057.050.367	0,051
3	BMTR	77.594.940	14.198.621.422	0,005
4	BNBR	1.031.036	97.021.717.528	0,000
5	HOTL	90.000.000	3.550.000.250	0,025
6	MIKA	-	14.550.736.000	0,000
7	SRTG	1.587.486.800	2.712.967.000	0,585
8	ICON	393.361.735	1.089.750.000	0,361
9	KPIG	109.548.352	6.891.067.237	0,016
10	PANR	41.765.500	1.200.000.000	0,035
11	MTDL	577.025.566	2.376.172.964	0,243
12	JTPE	125.000.000	1.713.012.500	0,073
13	MDIA	12.500	39.215.538.400	0,000
14	RANC	72.449.700	1.564.487.500	0,046
15	RALS	260.000.000	7.096.000.000	0,037
16	MIDI	18.750.000	2.882.353.000	0,007
17	ERAA	10.203.960	2.900.000.000	0,004
18	CSAP	162.639.200	4.053.052.920	0,040
19	AKRA	28.824.270	3.991.781.170	0,007
20	APII	622.214.760	1.075.760.000	0,578
21	CLPI	20.364.500	306.338.500	0,066
22	INTD	33.508.244	118.365.600	0,283
23	JKON	344.259.150	16.308.519.860	0,021
24	LTLS	43.196.000	1.560.000.000	0,028
25	MPMX	121.070.800	4.462.963.276	0,027
26	MICE	94.200.010	600.000.000	0,157
27	TGKA	3.297.200	918.492.750	0,004
28	UNTR	21.515	3.730.135.136	0,000

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Kepemilikan Manajerial		
		2017		
		Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Manajerial	Manajerial
1	BAYU	25.502.251	353.220.780	0,072
2	BHIT	2.382.691.000	48.057.050.367	0,050

3	BMTR	104.562.540	14.198.621.422	0,007
4	BNBR	1.031.075	113.535.564.308	0,000
5	HOTL	90.000.000	3.550.001.452	0,025
6	MIKA	-	14.550.736.000	0,000
7	SRTG	1.597.119.200	2.712.967.000	0,589
8	ICON	393.361.735	1.089.750.000	0,361
9	KPIG	109.010.552	7.407.912.279	0,015
10	PANR	41.765.500	1.200.000.000	0,035
11	MTDL	592.021.369	2.455.376.917	0,241
12	JTPE	125.000.000	1.713.012.500	0,073
13	MDIA	12.500	39.215.538.400	0,000
14	RANC	73.449.700	1.564.487.500	0,047
15	RALS	562.500.000	7.096.000.000	0,079
16	MIDI	18.750.000	2.882.353.000	0,007
17	ERAA	9.003.960	2.900.000.000	0,003
18	CSAP	265.839.200	4.053.052.920	0,066
19	AKRA	23.118.820	4.006.329.420	0,006
20	APII	60.146.480	1.075.760.000	0,056
21	CLPI	20.364.500	306.338.500	0,066
22	INTD	175.398.720	591.828.000	0,296
23	JKON	538.141.880	16.308.519.860	0,033
24	LTLS	47.831.000	1.560.000.000	0,031
25	MPMX	126.592.800	4.462.963.276	0,028
26	MICE	91.764.910	600.000.000	0,153
27	TGKA	5.017.500	918.492.750	0,005
28	UNTR	46.193	3.730.135.136	0,000

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Kepemilikan Manajerial		
		2018		
		Kepemilikan Manajerial	Jumlah Saham Beredar	Manajerial
1	BAYU	25.502.251	353.220.780	0,072
2	BHIT	2.393.034.000	51.939.135.584	0,046
3	BMTR	96.227.540	14.198.621.422	0,007
4	BNBR	83.449	20.771.977.000	0,000
5	HOTL	90.000.000	3.550.001.452	0,025
6	MIKA	9.147.700	14.550.736.000	0,001
7	SRTG	1.456.515.600	2.712.967.000	0,537
8	ICON	393.361.735	1.089.750.000	0,361
9	KPIG	1.090.409.220	74.079.122.790	0,015
10	PANR	42.765.500	1.200.000.000	0,036
11	MTDL	584.290.769	2.455.376.917	0,238
12	JTPE	125.000.000	1.713.012.500	0,073

13	MDIA	12.500	39.215.538.400	0,000
14	RANC	81.070.300	1.564.487.500	0,052
15	RALS	518.170.000	7.096.000.000	0,073
16	MIDI	18.750.000	2.882.353.000	0,007
17	ERAA	9.003.960	3.190.000.000	0,003
18	CSAP	122.639.200	4.458.352.920	0,028
19	AKRA	27.118.820	4.014.694.920	0,007
20	APII	60.146.480	1.075.760.000	0,056
21	CLPI	20.364.500	306.338.500	0,066
22	INTD	181.103.720	591.828.000	0,306
23	JKON	-	16.308.519.860	0,000
24	LTLS	70.127.000	1.560.000.000	0,045
25	MPMX	122.776.153	4.462.963.276	0,028
26	MICE	53.084.910	600.000.000	0,088
27	TGKA	6.569.800	918.492.750	0,007
28	UNTR	1.985.315	3.730.135.136	0,001

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Kepemilikan Manajerial		
		2019		
		Kepemilikan Manajerial	Jumlah Saham Beredar	Manajerial
1	BAYU	25.502.251	353.220.780	0,072
2	BHIT	2.357.990.700	67.767.400.934	0,035
3	BMTR	97.269.640	15.334.511.286	0,006
4	BNBR	84.939.499	20.863.053.480	0,004
5	HOTL	90.000.000	3.550.001.452	0,025
6	MIKA	10.125.700	14.246.349.500	0,001
7	SRTG	1.448.692.100	2.712.967.000	0,534
8	ICON	433.361.735	1.089.750.000	0,398
9	KPIG	1.096.065.820	80.625.726.664	0,014
10	PANR	42.765.500	1.200.000.000	0,036
11	MTDL	586.611.469	2.455.376.917	0,239
12	JTPE	125.000.000	1.713.012.500	0,073
13	MDIA	125.000	39.215.538.400	0,000
14	RANC	81.550.300	1.564.487.500	0,052
15	RALS	500.076.600	7.096.000.000	0,070
16	MIDI	18.750.000	2.882.353.000	0,007
17	ERAA	9.003.960	3.190.000.000	0,003
18	CSAP	140.639.200	4.458.352.920	0,032
19	AKRA	27.118.820	4.014.694.920	0,007
20	APII	60.146.480	1.075.760.000	0,056
21	CLPI	20.364.500	306.338.500	0,066
22	INTD	198.103.720	591.828.000	0,335

23	JKON	537.949.550	16.308.519.860	0,033
24	LTLS	70.127.000	1.560.000.000	0,045
25	MPMX	132.470.353	4.462.963.276	0,030
26	MICE	63.816.210	600.000.000	0,106
27	TGKA	6.497.250	918.492.750	0,007
28	UNTR	4.059.015	3.730.135.136	0,001

Sumber: diolah peneliti, 2022

NO	Kode Perusahaan	Kepemilikan Manajerial		
		2020		
		Kepemilikan Manajerial	Jumlah Saham Beredar	Manajerial
1	BAYU	25.502.251	353.220.780	0,072
2	BHIT	2.366.986.200	73.766.098.834	0,032
3	BMTR	83.229.640	16.583.997.586	0,005
4	BNBR	54.605.799	20.863.053.480	0,003
5	HOTL	918.616.700	3.550.001.452	0,259
6	MIKA	10.125.700	14.246.349.500	0,001
7	SRTG	1.481.909.447	2.712.967.000	0,546
8	ICON	433.361.735	1.089.750.000	0,398
9	KPIG	1.103.356.320	80.625.726.664	0,014
10	PANR	33.765.500	1.200.000.000	0,028
11	MTDL	596.896.469	2.455.376.917	0,243
12	JTPE	125.000.000	1.713.012.500	0,073
13	MDIA	125.000	39.215.538.400	0,000
14	RANC	81.550.300	1.564.487.500	0,052
15	RALS	500.076.600	7.096.000.000	0,070
16	MIDI	18.750.000	2.882.353.000	0,007
17	ERAA	9.048.960	3.190.000.000	0,003
18	CSAP	257.898.880	4.458.352.920	0,058
19	AKRA	26.573.620	4.014.694.920	0,007
20	APII	60.146.480	1.075.760.000	0,056
21	CLPI	20.364.500	306.338.500	0,066
22	INTD	192.398.720	591.828.000	0,325
23	JKON	100.505.200	16.308.519.860	0,006
24	LTLS	52.242.100	1.560.000.000	0,033
25	MPMX	137.455.053	4.462.963.276	0,031
26	MICE	63.816.210	600.000.000	0,106
27	TGKA	1.797.650	918.492.750	0,002
28	UNTR	130.415	3.730.135.136	0,000

Sumber: diolah peneliti, 2022

Lampiran 4 (Lanjutan) : Hasil Perhitungan Kepemilikan Manajerial

PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN -TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan

PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued

29. MODAL SAHAM

Seusai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan, PT BSR Indonesia pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

29. CAPITAL STOCK

Based on stockholders list issued by Administration Office of Listed Shares of the Company PT BSR Indonesia the stockholders of the Company as follows:

31 Desember/December 31, 2016				
Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah/ Total	Name of stockholder
HT Investment Development Ltd	13.199.078.138	27,88	1.319.908	HT Investment Development Ltd
UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd	8.402.553.000	17,75	840.255	UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd
PT Bhakti Panjiwira	5.113.807.112	10,80	511.381	PT Bhakti Panjiwira
Hary Tanoesoedibjo, MBA	2.158.525.300	4,56	215.853	Hary Tanoesoedibjo, MBA
Komisaris dan direksi				Commissioners and directors
Liliana Tanaja (Komisaris)	90.762.000	0,19	9.076	Liliana Tanaja (Commissioner)
Angela Herliani Tanoesoedibjo (Komisaris)	52.360.300	0,11	5.236	Angela Herliani Tanoesoedibjo (Commissioner)
Darma Putra (Wakil Direktur Utama)	29.359.100	0,06	2.936	Darma Putra (Vice President Director)
Tien (Direktur)	26.886.800	0,06	2.689	Tien (Director)
Henry Suparman (Direktur)	16.180.500	0,03	1.618	Henry Suparman (Director)
Natalia Purnama (Direktur)	7.457.000	0,02	746	Natalia Purnama (Director)
Johan Sebastian (Direktur)	1.000.000	0,00	100	Johan Sebastian (Director)
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	18.248.694.871	38,54	1.824.868	Public (each ownership below 5%)
Jumlah	47.346.664.121	100,00	4.734.666	Total
Ditambah: Saham diperoleh kembali (Catatan 34)	710.386.246		71.039	Add: Treasury stocks (Note 34)
Jumlah	48.057.050.367		4.805.705	Total

PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 SERTA UNTUK TAHUN -TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan

PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued

29. MODAL SAHAM

Seusai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan, PT BSR Indonesia pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

29. CAPITAL STOCK

Based on stockholders list issued by Administration Office of Listed Shares of the Company PT BSR Indonesia the stockholders of the Company as follows:

31 Desember/December 31, 2016				
Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah/ Total	Name of stockholder
HT Investment Development Ltd	13.199.078.138	27,88	1.319.908	HT Investment Development Ltd
UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd	8.402.553.000	17,75	840.255	UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd
PT Bhakti Panjiwira	5.113.807.112	10,80	511.381	PT Bhakti Panjiwira
Hary Tanoesoedibjo, MBA	2.158.525.300	4,56	215.853	Hary Tanoesoedibjo, MBA
Komisaris dan direksi				Commissioners and directors
Liliana Tanaja (Komisaris)	90.762.000	0,19	9.076	Liliana Tanaja (Commissioner)
Angela Herliani Tanoesoedibjo (Komisaris)	52.360.300	0,11	5.236	Angela Herliani Tanoesoedibjo (Commissioner)
Darma Putra (Wakil Direktur Utama)	29.359.100	0,06	2.936	Darma Putra (Vice President Director)
Tien (Direktur)	26.886.800	0,06	2.689	Tien (Director)
Henry Suparman (Direktur)	16.180.500	0,03	1.618	Henry Suparman (Director)
Natalia Purnama (Direktur)	7.457.000	0,02	746	Natalia Purnama (Director)
Johan Sebastian (Direktur)	1.000.000	0,00	100	Johan Sebastian (Director)
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	18.248.694.871	38,54	1.824.868	Public (each ownership below 5%)
Jumlah	47.346.664.121	100,00	4.734.666	Total
Ditambah: Saham diperoleh kembali (Catatan 34)	710.386.246		71.039	Add: Treasury stocks (Note 34)
Jumlah	48.057.050.367		4.805.705	Total

Lampiran 5 : Hasil Perhitungan Komite Audit

No	Kode Perusahaan	Σ Komite Audit				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAYU	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	BHIT	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0
3	BMTR	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0
4	BNBR	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
5	HOTL	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
6	MIKA	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7	SRTG	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8	ICON	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
9	KPIG	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10	PANR	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11	MTDL	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
12	JTPE	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
13	MDIA	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
14	RANC	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15	RALS	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
16	MIDI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
17	ERAA	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0
18	CSAP	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
19	AKRA	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20	APII	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
21	CLPI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22	INTD	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
23	JKON	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
24	LTLS	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25	MPMX	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
26	MICE	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
27	TGKA	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0
28	UNTR	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Sumber: diolah peneliti, 2022

Lampiran 5 (Lanjutan) : Hasil Perhitungan Komite Audit

d. Susunan Pengurus dan Informasi Lain

Susunan pengurus Perusahaan, **komite audit**, sekretaris Perusahaan dan unit audit internal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/December 31, 2016</u>	<u>31 Desember/December 31, 2015</u>	
<u>Komisaris</u>			<u>Commissioners</u>
Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo	Hary Djaja	: President Commissioner
Komisaris	: Lilliana Tanoesoedibjo Angela Herliani Tanoesoedibjo	Ratna Endang Soelistyawati Bambang Rudjanto Tanoesoedibjo Lilliana Tanoesoedibjo	: Commissioners
Komisaris Independen	: Kardinal Alamsyah Karim Darpto Pudyastungkoro	Kardinal Alamsyah Karim Darpto Pudyastungkoro	: Independent Commissioners
<u>Direksi</u>			<u>Directors</u>
Direktur Utama	: Darma Putra Wati	Hary Tanoesoedibjo	: President Director
Wakil Direktur Utama	: -	Darma Putra Wati	: Vice President Director
Wakil Direktur Utama dan Direktur Independen	: Susanty Tjandra Sanusi	Susanty Tjandra Sanusi	: Independent Director
Direktur	: Tien Natalia Purnama Johan Sebastian Henry Suparman	Tien Natalia Purnama Johan Sebastian Henry Suparman	: Directors
<u>Komite Audit</u>			<u>Audit Committee</u>
<u>Ketua</u>	: Kardinal Alamsyah Karim	Kardinal Alamsyah Karim	: Chairman
<u>Anggota</u>	: Darpto Pudyastungkoro Fransiska Therik	Darpto Pudyastungkoro Sonny Widjaja	: Members
Sekretaris Perusahaan	: Santi Paramita	Santi Paramita	: Corporate Secretary
Audit Internal	: Erny	Erny	: Internal Audit

d. Management and Other Information

At December 31, 2016 and 2015, the Company's management, audit committee, corporate secretary, and internal audit consists of the following:

Lampiran 6 : Data Variabel yang Menjadi Sampel

NO	Kode Perusahaan	Tahun	DKI (X1)	KI (X2)	KM (X3)	KA (X4)	TA (Y)
1	BAYU	2016	0,333	0,743	0,087	3	0,182
2		2017	0,333	0,633	0,072	3	0,182
3		2018	0,333	0,631	0,072	3	0,217
4		2019	0,333	0,675	0,072	3	0,087
5		2020	0,333	0,675	0,072	3	1,247
6	BHIT	2016	0,400	0,556	0,051	5	0,377
7		2017	0,333	0,566	0,050	3	0,652
8		2018	0,333	0,604	0,046	5	0,511
9		2019	0,333	0,507	0,035	5	0,257
10		2020	0,400	0,464	0,032	5	0,805
11	BMTR	2016	0,600	0,528	0,005	6	0,416
12		2017	0,750	0,529	0,007	6	0,341
13		2018	0,750	0,529	0,007	5	0,393
14		2019	0,750	0,488	0,006	5	0,542
15		2020	0,750	0,451	0,005	5	0,624
16	BNBR	2016	0,333	0,456	0,000	4	0,038
17		2017	0,333	0,521	0,000	4	0,081
18		2018	0,333	1,763	0,000	3	0,056
19		2019	0,500	1,569	0,004	3	0,213
20		2020	0,333	0,544	0,003	3	0,086
21	HOTL	2016	0,500	0,820	0,025	2	0,026
22		2017	0,500	0,820	0,025	2	2,033
23		2018	0,500	0,820	0,025	2	0,000
24		2019	0,500	0,820	0,025	1	0,875
25		2020	0,500	0,555	0,259	1	0,125
26	MIKA	2016	0,400	0,600	0,000	3	0,269
27		2017	0,400	0,600	0,000	3	0,290
28		2018	0,667	0,606	0,001	3	0,291
29		2019	0,667	0,619	0,001	3	0,357
30		2020	0,667	0,619	0,001	3	0,281
31	SRTG	2016	0,400	0,317	0,585	3	0,002
32		2017	0,400	0,326	0,589	3	0,028
33		2018	0,400	0,317	0,537	3	0,025
34		2019	0,400	0,327	0,534	3	0,010
35		2020	0,400	0,327	0,546	3	0,003
36	ICON	2016	0,333	0,318	0,361	3	1,216
37		2017	0,333	0,370	0,361	3	0,293
38		2018	0,333	0,370	0,361	3	0,298
39		2019	0,333	0,318	0,398	3	0,073
40		2020	0,500	0,403	0,398	3	0,450

41	KPIG	2016	0,400	0,487	0,016	3	0,035
42		2017	0,400	0,458	0,015	3	0,033
43		2018	0,400	0,433	0,015	3	0,056
44		2019	0,400	0,344	0,014	3	0,216
45		2020	0,500	0,475	0,014	3	0,102
46	PANR	2016	0,400	0,792	0,035	3	0,377
47		2017	0,400	0,792	0,035	3	0,372
48		2018	0,400	0,642	0,036	3	1,788
49		2019	0,400	0,6442	0,036	3	1,375
50		2020	0,333	0,642	0,028	3	0,042
51	MTDL	2016	0,500	0,253	0,243	3	0,428
52		2017	0,500	0,358	0,241	3	0,300
53		2018	0,500	0,358	0,238	3	0,277
54		2019	0,500	0,419	0,239	3	0,301
55		2020	0,500	0,419	0,243	3	0,019
56	JTPE	2016	1,000	0,657	0,073	3	0,234
57		2017	1,000	0,657	0,073	3	0,254
58		2018	1,000	0,657	0,073	3	0,243
59		2019	0,500	0,657	0,073	3	0,148
60		2020	0,500	0,657	0,073	3	0,460
61	MDIA	2016	0,500	0,095	0,000	3	0,988
62		2017	0,667	0,095	0,000	3	0,081
63		2018	0,333	0,900	0,000	3	0,719
64		2019	0,667	0,900	0,000	3	0,334
65		2020	2,000	0,900	0,000	3	0,365
66	RANC	2016	0,500	0,742	0,046	3	0,046
67		2017	0,500	0,750	0,047	3	0,309
68		2018	0,500	0,750	0,052	3	0,213
69		2019	0,500	0,741	0,052	3	0,088
70		2020	0,500	0,741	0,052	3	0,088
71	RALS	2016	0,667	0,615	0,037	3	0,075
72		2017	0,667	0,620	0,079	3	0,192
73		2018	0,667	0,559	0,073	3	0,102
74		2019	0,500	0,559	0,070	3	0,236
75		2020	0,500	0,559	0,070	3	0,104
76	MIDI	2016	1,000	0,867	0,007	3	0,219
77		2017	0,500	0,867	0,007	3	0,466
78		2018	1,000	0,867	0,007	3	0,204
79		2019	1,000	0,867	0,007	3	0,142
80		2020	1,000	0,104	0,007	3	0,218
81	ERAA	2016	0,500	0,600	0,004	3	0,068
82		2017	0,500	0,600	0,003	3	0,048
83		2018	0,500	0,545	0,003	3	0,472
84		2019	1,000	0,545	0,003	4	0,459

85		2020	0,500	0,545	0,003	3	0,318
86	CSAP	2016	0,667	0,708	0,040	3	0,549
87		2017	0,500	0,708	0,066	3	0,579
88		2018	0,500	0,547	0,028	3	0,719
89		2019	0,500	0,851	0,032	3	1,393
90		2020	0,667	0,860	0,058	3	0,809
91	AKRA	2016	0,500	0,586	0,007	3	0,339
92		2017	0,500	0,585	0,006	3	0,837
93		2018	0,500	0,585	0,007	3	1,384
94		2019	0,500	0,590	0,007	3	1,309
95		2020	0,500	0,596	0,007	3	0,564
96	APII	2016	0,500	0,165	0,578	3	0,317
97		2017	0,500	0,719	0,056	3	0,419
98		2018	0,500	0,719	0,056	3	0,157
99		2019	0,500	0,719	0,056	3	0,395
100		2020	0,500	0,719	0,056	3	0,527
101	CLPI	2016	0,500	0,660	0,066	3	0,278
102		2017	0,500	0,584	0,066	3	0,554
103		2018	0,500	0,584	0,066	3	0,751
104		2019	0,500	0,584	0,066	3	0,272
105		2020	0,500	0,584	0,066	3	0,304
106	INTD	2016	0,500	0,576	0,283	3	0,366
107		2017	0,500	0,576	0,296	3	0,349
108		2018	0,500	0,576	0,306	3	0,566
109		2019	1,000	0,547	0,335	3	0,846
110		2020	1,000	0,547	0,325	3	0,320
111	JKON	2016	0,667	0,609	0,021	3	0,181
112		2017	0,667	0,609	0,033	3	0,000
113		2018	0,500	0,609	0,000	3	0,201
114		2019	0,667	0,609	0,033	3	0,293
115		2020	0,500	0,609	0,006	3	0,710
116	LTLS	2016	1,000	0,541	0,028	3	0,650
117		2017	1,000	0,534	0,031	3	0,232
118		2018	1,000	0,534	0,045	3	0,109
119		2019	1,000	0,534	0,045	3	0,006
120		2020	0,667	0,547	0,033	3	0,353
121	MPMX	2016	0,500	0,707	0,027	3	0,386
122		2017	0,500	0,707	0,028	3	0,284
123		2018	0,500	0,707	0,028	3	2,836
124		2019	0,500	0,743	0,030	3	1,253
125		2020	0,667	0,623	0,031	3	0,421
126	MICE	2016	0,500	0,448	0,157	3	0,253
127		2017	0,500	0,448	0,153	3	0,110
128		2018	0,500	0,448	0,088	3	0,869

129		2019	0,500	0,448	0,106	3	0,290
130		2020	0,500	0,448	0,106	3	0,569
131	TGKA	2016	0,333	0,990	0,004	3	0,292
132		2017	0,333	0,982	0,005	4	0,250
133		2018	0,333	0,979	0,007	4	0,214
134		2019	1,000	0,979	0,007	4	0,221
135		2020	0,333	0,979	0,002	3	0,163
136	UNTR	2016	0,500	0,595	0,000	3	0,301
137		2017	1,000	0,595	0,000	3	0,193
138		2018	0,500	0,595	0,001	3	0,247
139		2019	0,500	0,595	0,001	3	0,442
140		2020	0,500	0,595	0,000	3	0,477

Lampiran 7 : Hasil Pengujian Data

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,20585820
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,078
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,121 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics		
		B	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,633		
	Kepemilikan Institusional	,051	,847	1,181
	Dewan Komisaris Independen	,044	,974	1,027
	Kepemilikan Manajerial	,068	,808	1,237
	Komite Audit	,024	,939	1,065

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil Uji Autokorelasi

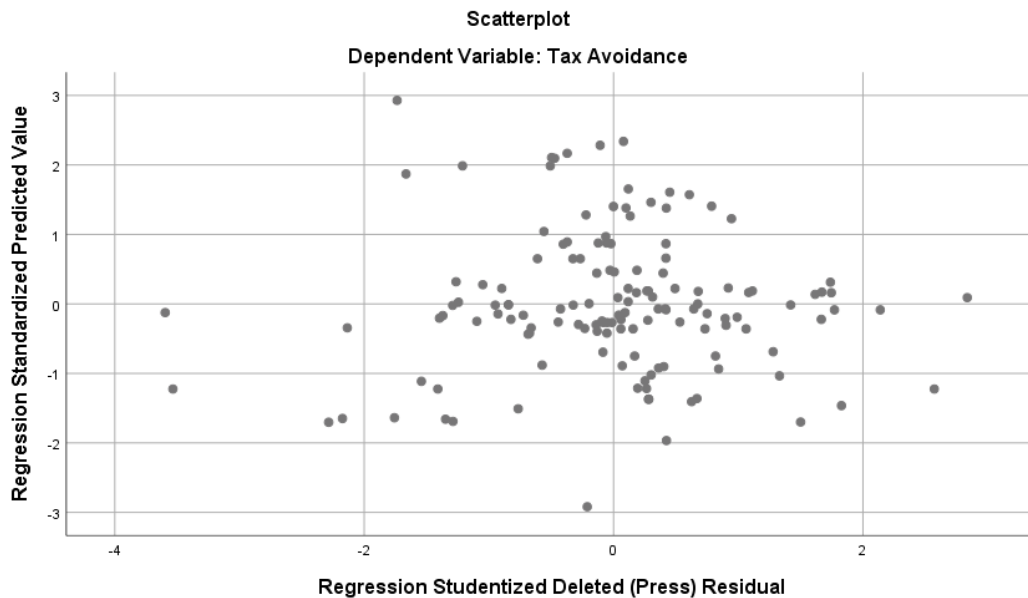
Model Summary^b

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,20889	1,967

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil Uji Heterokedastisitas



Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,633	,140	
	Kepemilikan Institusional	,051	,088	,053
	Dewan Komisaris Independen	,044	,078	,000
	Kepemilikan Manajerial	,068	,090	,072

Komite Audit	,024	,025	,083
--------------	------	------	------

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,633	,140		4,524	,000
Kepemilikan Institusional	,051	,088	,053	2,573	,046
Dewan Komisaris Independen	,044	,078	,000	1,901	,020
Kepemilikan Manajerial	,068	,090	,072	2,759	,045
Komite Audit	,024	,025	,083	2,948	,003

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil Uji Simultan

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,114	4	,029	8,654	,025 ^b
	Residual	5,890	135	,044		
	Total	6,005	139			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Mar'atul 'Ainish Sholikhah
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 12 Februari 1999
Alamat Asal : Kencong, Jember, Jawa Timur
Alamat Malang : Tegalgondo, Karangploso, Malang
Telepon/Hp : 082234821788
E-mail : maratulainish@gmail.com

Pendidikan Formal

2003 - 2005 : TK. Dewi Masyithoh Muslimat NU 73 Jombang
2005 - 2011 : SD Negeri Kencong 05
2011 - 2014 : SMP Negeri 1 Kencong
2014 - 2017 : SMA Negeri 1 Kencong - IPA
2018 - 2022 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2010 – 2015 : Lembaga Bimbingan Belajar PRIMAGAMA
2016 – 2017 : EVERGREEN English Center
2019 – 2020 : English Language Center (ELC) UIN Malang

Pengalaman Organisasi

- Palang Merah Remaja periode 2011 - 2016
- UPKM El Ma'rifah periode 2018 - 2019
- Unit Aktivitas Pers Mahasiswa INOVASI periode 2019 - 2020

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta pelatihan Zahir Fakultas Ekonomi UIN Malang tahun 2021
- Peserta pelatihan MYOB Fakultas Ekonomi UIN Malang tahun 2021

Malang, 27 Juni 2022

Mar'atul 'Ainish Sholikhah

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mar'atul 'Ainiah Sholikhah
NIM/ Jurusan : 18520055/ Akuntansi
Pembimbing : Fajar Nurdin, SE., M. Ak., CA
Judul Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016 – 2020)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	22 November 2021	Pengajuan Outline	1. 
2	16 Februari 2022	Proposal	2. 
3	20 Februari 2022	Revisi & Acc Proposal	3. 
4	25 Februari 2022	Seminar Proposal	4. 
5	4 Maret 2022	Acc Proposal	5. 
6	31 Maret 2022	Skripsi Bab I – V	6. 
7	27 Juni 2022	Revisi & Acc Skripsi	7. 
8	6 Juli 2022	Acc Keseluruhan	8. 

Malang, 7 Juli 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE.,
M.Bus., Ak. CA., Ph.D¹
NIP. 19760617200801 2 020